



Desa Bisa

**DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN



**TAHUN ANGGARAN
2023**



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-7989925 Fax. 021-7974488

www.kemendesa.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur IV

Budi Winarto, S.H., M.Si., QIA., CGCAE., CRMO
NIP. 19670510 198802 1 1001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja juga disusun untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam pencapaian kinerja di tahun ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami perlukan, dan akan dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dikemudian hari.

Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan untuk kemajuan Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan maupun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Jakarta, Desember 2023

Direktur

Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaan.



Nursaid, S.Sos., M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang ditetapkan; Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan dan fungsional; serta Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan.

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki alokasi Anggaran sesuai dengan pagu akhir DIPA 2023 sebesar Rp 97.062.160.000,-. Proporsi anggaran di Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut .

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.782.487.642,- (99,71%). Hingga pada akhir tahun anggaran, 31 Desember 2023, terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 279.672.358,- (0,29%). Bantuan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan tersebar merata di 28 provinsi, 118 kabupaten, dan 208 desa. Pembangunan diarahkan sebagai stimulant Pengembangan Objek Wisata Desa; Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Desa; Fasilitasi Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan; Pengembangan Amenitas Wisata; dan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan Kawasan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan..... | 2 |
| C. Struktur Organisasi..... | 3 |
| D. Sistematika Penyajian..... | 4 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 5 |
| A. Tugas dan Fungsi..... | 5 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 5 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 6 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 8 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 8 |
| B. Kinerja Anggaran..... | 13 |
| BAB IV PENUTUP..... | 17 |
| A. KESIMPULAN..... | 17 |
| B. SARAN..... | 17 |
| LAMPIRAN..... | 19 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PDP Tahun 2020-2024 | 2 |
| Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama..... | 6 |
| Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 6 |
| Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 | 8 |
| Tabel 3. 2 Pencapaian Target pada RO..... | 10 |
| Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023..... | 11 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan Jumlah Penerima Bantuan Tahun 2022 dan Tahun 2023..... | 11 |
| Tabel 3. 5 Jumlah Anggaran Tahun 2023 | 13 |
| Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output | 14 |
| Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 14 |
| Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Berdasarkan Rincian Output TA 2023 | 15 |
| Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Dit. PSPDP dalam 3 Tahun Terakhir..... | 16 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi | 3 |
| Gambar 1. 2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia..... | 3 |
| Gambar 3. 1 Kurva Rencana Penyerapan Anggaran TA 2023 | 13 |
| Gambar 3. 2 Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DIPA..... | 15 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023 | 19 |
| Lampiran 2. Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2022 | 22 |
| Lampiran 3. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023 | 25 |
| Lampiran 4. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun 2023 | 34 |
| Lampiran 5. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 2023 | 39 |
| Lampiran 6. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun 2023 | 46 |
| Lampiran 7. Dokumen Surat Tugas Kelompok Kerja dan Pembagian Lokus Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2023 | 52 |
| Lampiran 8. Dokumen Surat Tugas Pelaksana Identifikasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun 2023 | 65 |
| Lampiran 9. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023 ... | 86 |
| Lampiran 10. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun 2023 | 90 |
| Lampiran 11. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 2023 | 94 |
| Lampiran 12. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun 2023 | 98 |
| Lampiran 13. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun 2023 | 103 |
| Lampiran 14. Dokumen SK Dirjen PDP tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan..... | 107 |
| Lampiran 15. Dokumentasi Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 111 |
| Lampiran 16. Dokumentasi Kegiatan | 113 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan kemandirian desa. Maka dari itu, pembangunan desa dan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) Mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan, khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat- pusat pertumbuhan terdekat.

Kondisi tersebut diatas dapat terwujud jika didorong oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi kinerja dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAPKIN). LAPKIN disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Selain itu LAPKIP juga disusun untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Kebijakan teknis Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan tahun 2023, bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan diprioritaskan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

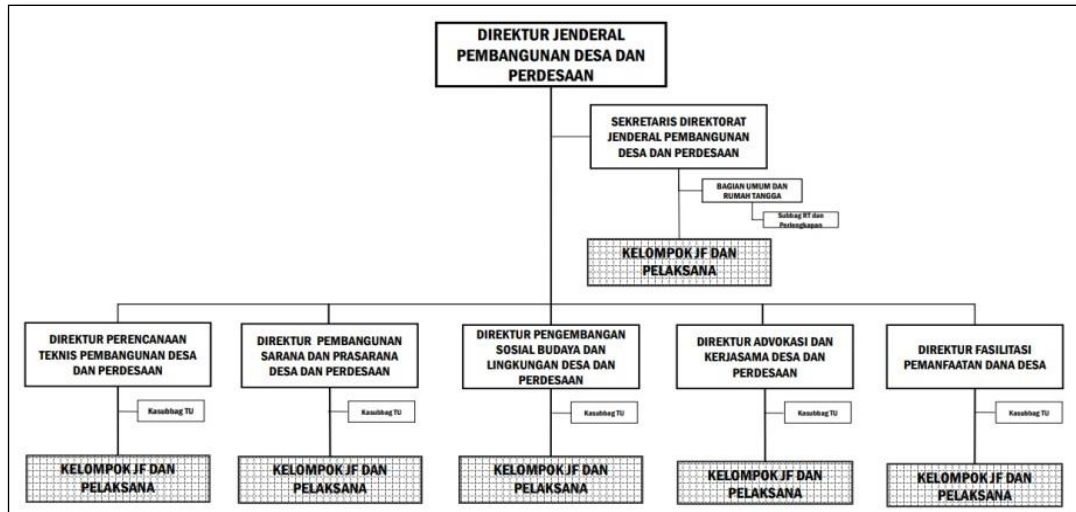
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Direktorat Jenderal PDP) Tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yakni: Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan. Secara lebih rinci, sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PDP Tahun 2020-2024

| TUJUAN UMUM | RINCIAN TUJUAN | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | RINCIAN INDIKATOR |
|--|---|--|--|
| Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan desa dalam rangkameningkatkan kemandiriandan daya saing desa dan kawasan perdesaan, melalui pembangunan sarana dan pra sarana, pengembangan sosial budaya dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan advokasi; Mengembangkan kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan; Fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa dan perdesaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan dan penanggulangan kemiskinan perdesaan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya. | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah desa mandiri Jumlah desa berkembang Jumlah desa tertinggal | <ul style="list-style-type: none"> Penambahan 5.000 desa mandiri Penambahan 10.000 desa berkembang |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) Peningkatan Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian |
| | | Persentase kemiskinan di perdesaan | Persentase kemiskinan di perdesaan pada akhir RPJMN sebesar 9,90persen |
| | | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi | <ul style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi Nilai Kesehatan organisasi Persentase pelaksanaan e-government (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Penerapan Sistem Merit |
| | | Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif | <ul style="list-style-type: none"> Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai integritas Nilai SAKIP Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) |

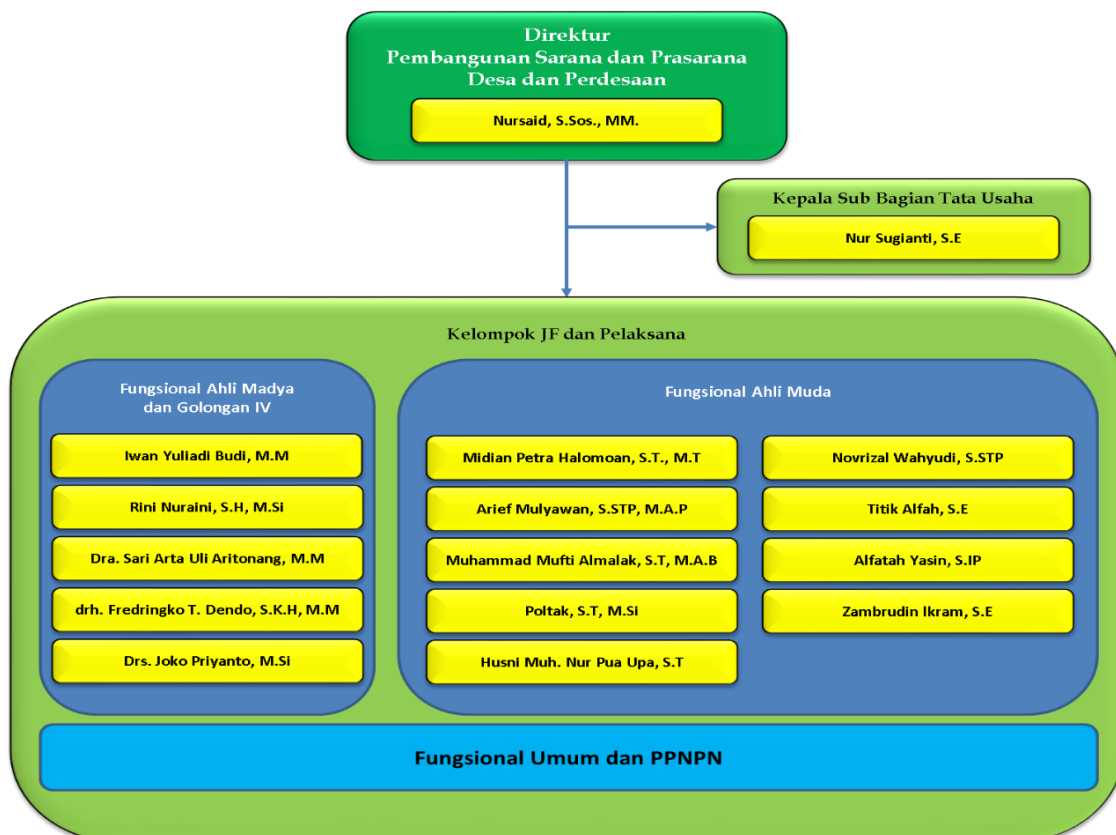
C. Struktur Organisasi

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berada dibawah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 132 tahun 2020, memiliki bentuk struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi

Adapun ketersediaan sumber daya manusia pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam Tahun Anggaran 2023, dengan bentuk sajian seperti berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan serta sekilas pengantar lainnya seperti, tujuan dan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas dan diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal PDP dan evaluasi capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh dari isi Laporan Kinerja dan rekomendasi yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

B. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|-----|--|
| 1 | Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan | 1.1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan |
| 2 | Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan | 2.1 | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional |
| 3 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | 3.1 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan atas komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas capaian kinerja. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, serta mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2023 dan beban tugas, maka ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|--|-----|---|--------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan | 1.1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan | 4 | Dokumen |
| 2 | Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan | 2.1 | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan | 70 | Persen (%) |

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|--|-----|---|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional | | |
| 3 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | 3.1 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | 1 | Dokumen |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Capaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan tahun anggaran 2023 bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan | Dokumen | 4 | 6 | 150% |
| 2 | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional | Persen (%) | 70 | 100 | 143% |
| 3 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | Dokumen | 1 | 1 | 100% |

Realisasi jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan, diukur dari jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun anggaran 2023, bahan kebijakan dan regulasi pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 6 (enam) dokumen, atau mencapai 150% dari target yang diperjanjikan. Bahan kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal terkait Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan. Adapun bahan kebijakan dan regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 107.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023;

- b) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 214.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 215.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023;
- d) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 126.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2023;
- e) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 414.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2023;
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 521.1.3 tahun 2023 tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan.

Realisasi Persentase Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan Fungsional pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%, dimana bantuan pemerintah yang diberikan diberikan kepada penerima bantuan telah terbangun sesuai dengan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di desa. Bila dibandingkan dengan targetnya, yaitu 70%, maka pada sasaran kegiatan ini persentase ketercapaian target yaitu sebesar 142,86% atau sudah melebihi target Perjanjian Kinerja.

Realisasi jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, capaian ini berupa Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun 2023.

Laporan Kinerja tersebut mencakup data capaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dari realisasi program kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Pasar Desa, Pengembangan Objek Wisata, Pengembangan Amenitas Wisata, Pengembangan Pariwisata Terpadu, dan Jalan Kawasan Perdesaan.

2. Berdasarkan Jenis/Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023

Pencapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan apabila dibandingkan dengan target pada RO dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pencapaian Target pada RO

| KEGIATAN | Sat. | 2023 | | |
|---------------------------------|------|---------|-----------|---------|
| | | Rencana | Realisasi | Capaian |
| Pasar Desa dan Perdesaan | Unit | 30 | 30 | 100% |
| Pengembangan Obyek Wisata | Unit | 159 | 159 | 100% |
| Pengembangan Amenitas | Unit | 8 | 8 | 100% |
| Pengembangan Pariwisata Terpadu | Unit | 4 | 4 | 100% |
| Sarana dan Prasarana Air Bersih | Unit | - | - | - |
| Jalan Desa dan Perdesaan | Km | 3,0 | 4,5 | 150% |

Secara umum pencapaian kinerja berdasarkan jumlah/penerima bantuan, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan mencapai kinerja sebesar 100% dan khusus untuk jenis kegiatan Jalan Desa dan Perdesaan mencapai kinerja hingga 150%. Adapun untuk kinerja yang tidak tercapai disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang diakibatkan oleh *Automatic Adjustment* pada tahun anggaran 2023.

3. Perbandingan Capaian

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan tahun anggaran 2023 secara umum mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Peningkatan ini terlihat pada indikator Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional yang mengalami peningkatan dari semula 124% pada tahun 2023, meningkat menjadi 143%.

Selain itu peningkatan pun dapat terlihat pada indikator jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan, yang merupakan indikator kinerja utama baru sebagai akibat pemberlakuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022-2024. Detail perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 150 | 4 | 6 | 150 |
| 2 | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional | 70 | 100 | 143 | 80 | 99 | 124 | 70 | 100 | 143 |
| 3 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 |

Apabila diperbandingkan dari jumlah bantuan pemerintah yang diberikan oleh Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan kepada penerima bantuan, maka dapat disimpulkan secara umum jumlah penerima bantuan pada tahun anggaran 2023 meningkat daripada Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun Anggaran 2021, kecuali pada jenis bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih, dimana pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

Tabel 3. 4 Perbandingan Jumlah Penerima Bantuan Tahun 2021 s.d.Tahun 2023

| KEGIATAN | Sat. | Realisasi | | |
|---------------------------------|------|-----------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pasar Desa dan Perdesaan | Unit | - | 20 | 30 |
| Pengembangan Obyek Wisata | Unit | 100 | 100 | 159 |
| Pengembangan Amenitas | Unit | 59 | 6 | 8 |
| Pengembangan Pariwisata Terpadu | Unit | - | 2 | 4 |
| Sarana dan Prasarana Air Bersih | Unit | 1 | 1 | - |
| Jalan Desa dan Perdesaan | Km | - | 1,9 | 4,5 |

4. Analisis Penyebab Perbedaan Realisasi Kinerja

a) Perjanjian Kinerja

Perbedaan pencapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berdasarkan perjanjian kinerja, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Pada Indikator Kinerja Utama Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional, pada tahun 2023 realisasi mencapai mencapai 100% dikarenakan seluruh bantuan dapat terlaksana dengan baik, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 desa yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya kendala di daerah.

Selain itu secara target perjanjian, pada tahun 2023 terdapat penurunan target realisasi dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran dan penambahan jumlah penerima bantuan. Faktor-faktor tersebut yang mendorong peningkatan kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dari 124% pada tahun 2022 menjadi 143% pada tahun 2023. Peningkatan kinerja ini juga didukung dengan asistensi yang intens kepada penerima bantuan sehingga penerima bantuan dapat memilih menu bantuan yang tepat menyesuaikan waktu pekerjaan yang diberikan.

- Terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 266 tahun 2023.

b) Jumlah Penerima Bantuan

Perbedaan pencapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berdasarkan Jenis/Jumlah bantuan, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Peningkatan anggaran Tahun 2022 yang sebesar 69.219.855.000 menjadi 97.062.160.000 pada Tahun 2023, secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penerima bantuan.

- Selain peningkatan jumlah bantuan, terdapat pula bantuan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih. Hal disebabkan oleh adanya *Automatic Adjustment* pada tahun anggaran 2023.

Pelaksanaan *Automatic Adjustment*, menyebabkan ketidakterseidannya anggaran dan keterlambatan kepastian pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, sehingga menyebabkan ketidakcukupan waktu pelaksanaan kegiatan.

B. Kinerja Anggaran

1. Anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan mengalami perbedaan dengan pagu akhir DIPA 2023. Pagu awal DIPA tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 98.262.160.000,- kemudian menjadi sebesar Rp. 97.062.160.000,- karena besaran blokir Automatic Adjustment telah di tarik ke Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Jumlah Anggaran Tahun 2023

| Anggaran | Awal | Akhir |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Pagu Efektif | 98.262.160.000 | 97.062.160.000 |
| <i>Automatic Adjustment</i> | 0 | 1.200.000.000 |

Adapun rencana penyerapan anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Kurva Rencana Penyerapan Anggaran TA 2023

Dalam DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, alokasi anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan terbagi menjadi beberapa Rincian Output dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output

| No | Rincian Output (RO) | Anggaran |
|---------------|---|-----------------------|
| 1 | Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan | 150.000.000 |
| 2 | Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata | 750.000.000 |
| 3 | Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang dibangun | 11.391.000.000 |
| 4 | Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata | 73.414.160.000 |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dan pariwisata | 1.850.000.000 |
| 6 | Amenitas Wisata yang dibangun/dikembangkan | 4.557.000.000 |
| 7 | Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun | 4.950.000.000 |
| Jumlah | | 97.062.160.000 |

2. Realisasi Tahun Anggaran 2023

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, pada tahun 2023 berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 96.782.487.642 (99,71%) dari total anggaran sebesar Rp. 97.062.160.000. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

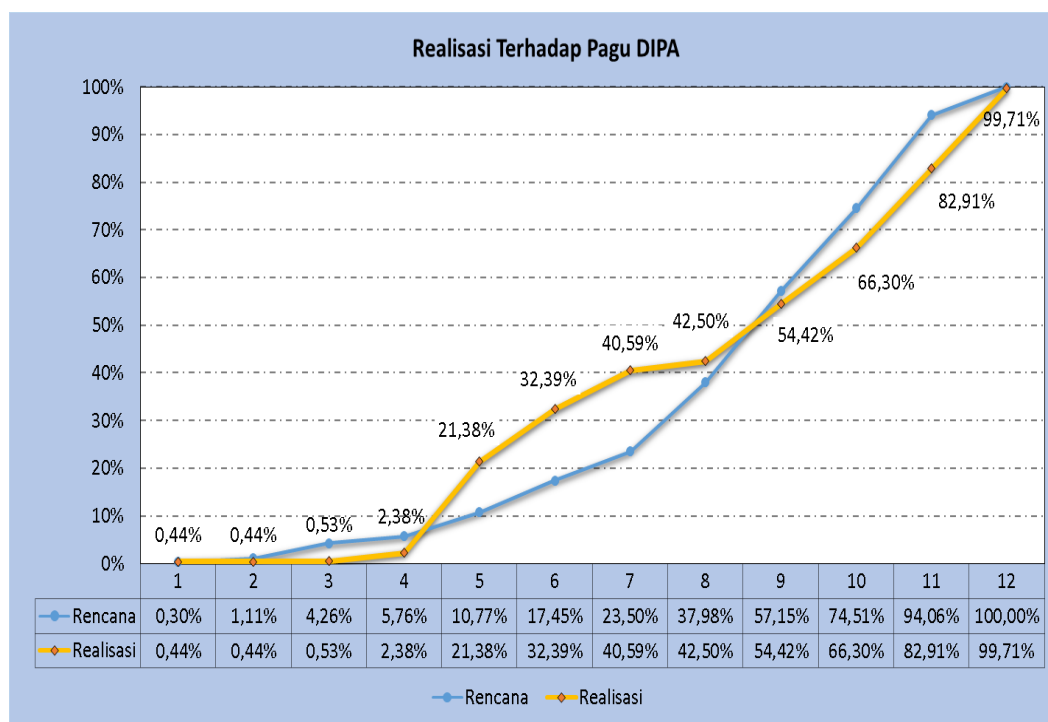
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023

| Anggaran | Pagu | Realisasi | Capaian |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| Pagu Efektif | 97.062.160.000 | 96.782.487.642 | 99,71% |

Distribusi realisasi anggaran sepanjang tahun 2023 secara umum mengikuti pola sebagai berikut: pada awal tahun anggaran (Januari s/d April) realisasi cenderung datar dibawah kurva perencanaan, hal ini disebabkan karena komposisi anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan yang sebagian besar adalah bantuan pemerintah (pola termin).

Pada catur wulan kedua (Mei – Agustus) terjadi peningkatan realisasi dikarenakan kegiatan bantuan pemerintah sebagian besar telah melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilanjutkan dengan pencairan termin 1 sebesar 70% dari nilai bantuan.

Pada catur wulan terakhir, penyerapan cenderung melandai dikarenakan hanya merealisasikan sisa termin (30%) dan pelaksanaan kegiatan rutin lainnya. Kurva realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 2 Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DIPA

Sedangkan capaian kinerja anggaran hingga akhir tahun anggaran 2023, apabila dirinci berdasarkan Rincian Output (RO), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Berdasarkan Rincian Output TA 2023

| No | Rincian Output (RO) | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|----|---|----------------|----------------|---------|
| 1 | Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan | 150.000.000 | 146.670.450 | 97,78% |
| 2 | Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata | 750.000.000 | 694.060.700 | 92,54% |
| 3 | Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang dibangun | 11.391.000.000 | 11.345.629.764 | 99,60% |
| 4 | Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata | 73.414.160.000 | 73.305.434.979 | 99,85% |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dan pariwisata | 1.850.000.000 | 1.847.807.093 | 99,88% |

| No | Rincian Output (RO) | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---------------|---|----------------|----------------|---------|
| 6 | Amenitas Wisata yang dibangun/dikembangkan | 4.557.000.000 | 4.503.146.127 | 98,82% |
| 7 | Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun | 4.950.000.000 | 4.939.738.529 | 99,79% |
| Jumlah | | 97.062.160.000 | 96.782.487.642 | 99,71% |

Capaian kinerja anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Tahun Anggaran 2023, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Dit. PSPDP dalam 3 Tahun Terakhir

| No | Rincian Output (RO) | T.A. 2021 | T.A. 2022 | T.A. 2023 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Capaian | Capaian | Capaian |
| 1 | Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan | - | - | 97,78% |
| 2 | Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata | 98.62% | 99,60% | 92,54% |
| 3 | Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang dibangun | 85.24% | 99,84% | 99,60% |
| 4 | Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata | 99.83% | 99,35% | 99,85% |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dan pariwisata | - | 99,35% | 99,88% |
| 6 | Amenitas Wisata yang dibangun/dikembangkan | 98.75% | 99,73% | 98,82% |
| 7 | Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun | 97.32% | 99,91% | 99,79% |
| 8 | Sarana Pelayanan Dasar yang dibangun/ dikembangkan/ direhabilitasi (Sarana Air Bersih) | 99.94% | 99,64 | - |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Realisasi penyerapan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 96.782.487.642,- (99,71%). Kendala dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a) Perencanaan yang tidak matang menyebabkan ketidakpastian lokus penerima bantuan sarana dan prasarana desa, sehingga lokus tidak dapat segera ditetapkan yang pada akhirnya berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan;
 - b) Belum optimalnya koordinasi internal di lingkungan Unit Kerja Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - c) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan Unit Kerja terkait di tingkat daerah sampai dengan lapangan;
 - d) Keterbatasan jumlah dan kemampuan/kompetensi SDM pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.
2. Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja K/L pada Tahun Anggaran 2023, berdampak pada: perubahan jumlah nominal alokasi bantuan pemerintah, penyesuaian target capaian pada volume kegiatan infrastruktur, dan mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 masih terbatas pada pemberian bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Desa; Pengembangan Objek Wisata Desa; Fasilitasi Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan; Pengembangan Amenitas Wisata, dan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan Kawasan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Sementara sampai dengan saat ini masih banyak usulan/proposal dari Desa dan Kabupaten terkait permohonan bantuan penanganan masalah Sarana dan Prasarana lainnya yang tidak mampu ditangani dengan keberadaan dana desa.

B. SARAN

1. Untuk peningkatan kinerja kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, selayaknya perencanaan dan penentuan lokus pemberian bantuan sudah dilakukan sejak T-1 pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi program pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa yang bersifat *pilot project* selektif, dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi program dengan Kementerian/Lembaga lain, yang dipadukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang sarana dan prasarana desa.

4. Untuk peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, selain didukung oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), perlu melibatkan Tenaga Ahli di bidang Infrastruktur, Arsitektur, Elektrifikasi dan Teknologi Informatika.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nursaid, Jabatan Direktur Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan :
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan


Sugito

Pembuat Pernyataan


Nursaid



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursaid
Jabatan : Direktur Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugito
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara **periodik** setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sugito

Pihak Pertama,

Nursaid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN
PERDESAAN

A. Sasaran Target Kinerja

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|---|-----|--|--------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan | 1.1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan | 4 | Dokumen |
| 2 | Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan | 2.1 | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional | 70 | Persen (%) |
| 3 | Tertersedianya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | 3.1 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan | 1 | Dokumen |

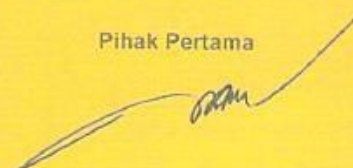
B. Kegiatan dan Anggaran

| No | Kegiatan | Anggaran |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Pembangunan Desa dan Perdesaan | Rp 98.262.160.000, <i>(Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</i> |
| | Jumlah | Rp 98.262.160.000, <i>(Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</i> |

Pihak Kedua


Sugito

Pihak Pertama


Nursaid



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

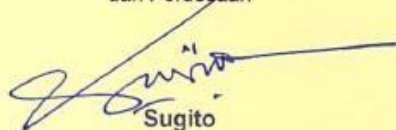
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nursaid**, Jabatan **Direktur Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan**, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya


Jakarta, Januari 2022

Menyaksikan :
Direktur Jenderal Pembangunan Desa
dan Perdesaan



Sugito

Pembuat Pernyataan



Nursaid



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursaid
Jabatan : Direktur Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugito
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Sugito

Pihak Pertama,

Nursaid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN

A. Sasaran Target Kinerja

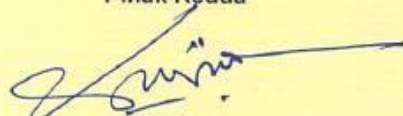
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|---|--|--------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Desa dan Perdesaan | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan yang ditetapkan | 4 | Dokumen |
| 2 | Terpenuhinya prasarana dan sarana desa dan perdesaan | Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional | 80 | Persentase |
| 3 | Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti | 80 | Persentase |

B. Kegiatan dan Anggaran

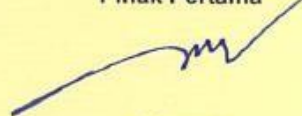
| No | Kegiatan: | Anggaran: |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Pembangunan Desa Dan Perdesaan | Rp. 76.500.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) |
| | Jumlah | Rp. 76.500.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) |

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua


Sugito

Pihak Pertama


Nursaid

Lampiran 3. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 488.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
DESA DAN PERDESAAN NOMOR 254.4.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan objek wisata Desa, diperlukan bantuan pembangunan sarana dan prasarana sehingga dilakukan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan dinamika dan kondisi di lapangan dan perkembangan situasi maka perlu adanya penyesuaian lokasi dan alokasi penerima bantuan, dengan melakukan perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 254.4.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pengembangan Objek Wisata Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 254.4.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pengembangan Objek Wisata Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian ...

- Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);

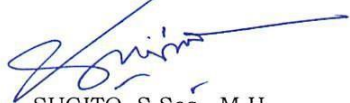
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN NOMOR 254.4.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan perubahan keempat lokasi dan alokasi penerima bantuan pengembangan objek wisata Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, sebanyak 159 Desa dengan anggaran sebesar Rp61.900.000.000,- (Enam puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Ditjen PDP;
11. Yang bersangkutan.

5

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NOMOR 488.4.3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN NOMOR 254.4.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

| SEMULA | | | | | | | | | MENJADI | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|-----------------|----|------------------|----|---------------------|---------------|---------|----------------|----|------------------|----|---------------|----|---------------------|---------------|--|
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI | NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Aceh | 1 | Pidie | 1 | Keumala | 1 | Ugadeng | Rp400,000,000 | 1 | Aceh | 1 | Pidie | 1 | Keumala | 1 | Ugadeng | Rp400,000,000 | |
| | | 2 | Aceh Besar | 2 | Kota Jantho | 2 | Suka Tani | Rp400,000,000 | | | 2 | Aceh Besar | 2 | Kota Jantho | 2 | Suka Tani | Rp400,000,000 | |
| 2 | Riau | 3 | Rokan Hilir | 3 | Tanjung Medan | 3 | Tanjung Medan | Rp400,000,000 | 2 | Sumatera Utara | 5 | Tapaneli Utara | 5 | Muara | 5 | Baribaniaek | Rp400,000,000 | |
| | | 4 | Indragiri Hilir | 4 | Kempas | 4 | Danau Pulau Indah | Rp400,000,000 | | | 6 | Karo | 6 | Naman | 7 | Kutarayat | Rp400,000,000 | |
| | | 5 | Rokan Hulu | 5 | Mandah | 5 | Pulau Cawan | Rp300,000,000 | | | 7 | Mandailing Natal | 7 | Tambangan | 8 | Pastap | Rp300,000,000 | |
| | | 6 | Rokan Hulu | 6 | Rambah Tengah | 6 | Rambah Tengah Hilir | Rp400,000,000 | | | 8 | Samosir | 8 | Pangururan | 9 | Huta Timggi | Rp400,000,000 | |
| | | 7 | Siak | 7 | Dayun | 7 | Dayun | Rp400,000,000 | 3 | Riau | 9 | Rokan Hilir | 9 | Tanjung Medan | 10 | Tanjung Medan | Rp400,000,000 | |
| | | 8 | Bengkalis | 8 | Bandar Laksamana | 8 | Sepahat | Rp400,000,000 | | | 10 | Indragiri Hilir | 10 | Kempas | 11 | Danau Pulau Indah | Rp400,000,000 | |
| | | 9 | Kampar | 9 | Koto Kampar Hulu | 9 | Tanjung | Rp400,000,000 | | | 11 | | 11 | Mandah | 12 | Pulau Cawan | Rp300,000,000 | |
| | | 10 | | 10 | Siak Hulu | 10 | Buluh Cino | Rp400,000,000 | | | 12 | Rokan Hulu | 12 | Rambah Tengah | 13 | Rambah Tengah Hilir | Rp400,000,000 | |
| 3 | Kepulauan Riau | 9 | Natuna | 11 | Serasan | 11 | Tanjung Setelung | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Bunguran Timur | 12 | Bunguran Timur | 12 | Batu Gajah | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | |

4. Sumatera...

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|------------------|----|------------------|----|--------------------|----|----------------------|---------------|----|------------------|----|------------------|----|--------------------|----|----------------------|---------------|
| 4 | Sumatera Barat | 10 | Lima Puluh Kota | 13 | Lareh Sago Halaban | 13 | Nagari Balai Panjang | Rp400,000,000 | | | 12 | Siak | 13 | Dayun | 14 | Dayun | Rp400,000,000 |
| | | 11 | Kota Pariaman | 14 | Pariaman Selatan | 14 | Pasir Sunur | Rp400,000,000 | | | 13 | Bengkalis | 14 | Bandar Laksamana | 15 | Sepahat | Rp400,000,000 |
| | | 12 | Solok | 15 | Lembah Gumanti | 15 | Nagari Sungai Nanam | Rp400,000,000 | | | 14 | Kampar | 15 | Koto Kampar Hulu | 16 | Tanjung | Rp400,000,000 |
| | | 16 | | 16 | Pantai Cermin | 16 | Nagari Surian | Rp400,000,000 | | | 16 | | 16 | Siak Hulu | 17 | Buluh Cino | Rp400,000,000 |
| 5 | Sumatera Selatan | 13 | Ogan Ilir | 17 | Indralaya Selatan | 17 | Meranjat 1 | Rp400,000,000 | 4 | Kepulauan Riau | 15 | Natuna | 17 | Serasan | 18 | Tanjung Setelung | Rp400,000,000 |
| | | 14 | Banyuasin | 18 | Banyuasin II | 18 | Sungsang IV | Rp400,000,000 | | | 18 | | 18 | Bunguran Timur | 19 | Batu Gajah | Rp400,000,000 |
| | | 19 | | 19 | Tungkal Ilir | 19 | Teluk Tenggulang | Rp400,000,000 | 5 | Sumatera Barat | 16 | Lima Puluh Kota | 19 | Lareh Sago Halaban | 20 | Nagari Balai Panjang | Rp400,000,000 |
| | | 20 | | 20 | Airsalek | 20 | Damarwulan | Rp400,000,000 | | | 17 | Kota Pariaman | 20 | Pariaman Selatan | 21 | Pasir Sunur | Rp400,000,000 |
| | | 21 | | 21 | Muara Padang | 21 | Air Gading | Rp400,000,000 | | | 18 | Padang Pariaman | 21 | Batang Gasan | 22 | Gasam Gadang | Rp400,000,000 |
| | | 15 | Musi Banyuasin | 22 | Babat Supat | 22 | Parseh | Rp400,000,000 | | | 19 | Solok | 22 | Lembah Gumanti | 23 | Nagari Sungai Nanam | Rp400,000,000 |
| | | 16 | Musi Rawas Utara | 23 | Karang Raya | 23 | Bukit Ulu | Rp400,000,000 | | | 20 | | 23 | Pantai Cermin | 24 | Nagari Surian | Rp400,000,000 |
| | | 17 | Empat Lawang | 24 | Lintang Kanan | 24 | Muara Danau | Rp400,000,000 | | | 20 | Agam | 24 | Tanjung Mutiara | 25 | Tiku Selatan | Rp400,000,000 |
| 6 | Jambi | 18 | Tebo | 25 | Rimbo Ulu | 25 | Suka Damai | Rp400,000,000 | 6 | Sumatera Selatan | 21 | Ogan Ilir | 25 | Indralaya Selatan | 26 | Meranjat 1 | Rp400,000,000 |
| 7 | Lampung | 19 | Lampung Timur | 26 | Bandar Sribhawono | 26 | Srimenanti | Rp400,000,000 | | | 22 | Banyuasin | 26 | Banyuasin II | 27 | Sungsang IV | Rp400,000,000 |
| | | 20 | Lampung Utara | 27 | Abung Tengah | 27 | Pekurun Barat | Rp400,000,000 | | | 27 | | 27 | Tungkal Ilir | 28 | Teluk Tenggulang | Rp400,000,000 |
| 8 | Jawa Barat | 21 | Bandung | 28 | Banjaran | 28 | Pasirmulya | Rp400,000,000 | | | 28 | | 28 | Airsalek | 29 | Damarwulan | Rp400,000,000 |
| | | | | | | | Margahurip | Rp400,000,000 | | | 29 | | 29 | Muara Padang | 30 | Air Gading | Rp400,000,000 |
| | | | | | | | Pingirsari | Rp400,000,000 | | | 23 | Musi Banyuasin | 30 | Babat Supat | 31 | Gajah Mati | Rp400,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 24 | Musi Rawas Utara | 31 | Karang Raya | 32 | Bukit Ulu | Rp400,000,000 |

30. Cimaung ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
|----|-------------|----|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 9 | Jawa Tengah | | | 30 | Cimaung | 31 | Cimaung | Rp400,000,000 | 10 | Jawa Barat | 31 | 25 | Empat Lawang | 32 | Lintang Kanan | 33 | Muara Danau | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 31 | Kutawaringin | 32 | Sukamulya | Rp400,000,000 | | | | 26 | Tebo | 33 | Rimbo Ulu | 34 | Suka Damai | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 32 | Pengalengan | 33 | Sukulayu | Rp400,000,000 | | | | 27 | Muaro Jambi | 34 | Jambi Luar Kota | 35 | Muaro Pijoan | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 22 | Ciamis | 33 | Sindangkasih | 34 | | | | Gunungcupu | Rp400,000,000 | 28 | Lampung Timur | 35 | Bandar Sribhawono | 36 | Srimenanti | Rp400,000,000 |
| | | | | 34 | Rajadesa | 35 | Rajadesa | Rp300,000,000 | | | | 29 | Lampung Utara | 36 | Abung Tengah | 37 | Pekurun Barat | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 23 | Indramayu | 35 | Sindang | 36 | | | | Sindang | Rp400,000,000 | 30 | Serang | 37 | Ciomas | 38 | Citaman | Rp400,000,000 |
| | | | | 36 | Patrol | 37 | Patrol Lor | Rp400,000,000 | | | | 32 | Ciamis | 38 | Banjaran | 39 | Pasirmulya | 40 | Margahurip | Rp400,000,000 |
| | | | | 24 | Tasikmalaya | 37 | Salawu | 38 | | | | | | Neglasari | Rp400,000,000 | 39 | Arjasari | 41 | Pinggirsari | Rp400,000,000 |
| | | | | 38 | Rajapolah | 39 | Sukaraja | Rp400,000,000 | | | | | | 40 | Cimaung | 42 | Cimaung | 43 | Sukamulya | Rp400,000,000 |
| | | | | 25 | Sumedang | 39 | Jatigede | 40 | | | | | | Kadujaya | Rp400,000,000 | 41 | Kutawaringin | 43 | Sukamulya | Rp400,000,000 |
| | | | | 26 | Cianjur | 40 | Cugenang | 41 | | | | | | Gasol | Rp400,000,000 | 42 | Pengalengan | 44 | Sukulayu | Rp400,000,000 |
| | | | | 41 | Cidaun | 42 | Jayapura | Rp400,000,000 | | | | | | 43 | Sindangkasih | 45 | Gunungcupu | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 27 | Bogor | 42 | Pamijahan | 43 | | | | | | Gunungsari | Rp400,000,000 | 44 | Rajadesa | 46 | Rajadesa | Rp300,000,000 |
| | | | | 28 | Magelang | 43 | Dukun | 44 | | | | | | Banyubiru | Rp400,000,000 | 45 | Sindang | 47 | Sindang | Rp400,000,000 |
| | | | | 29 | Semarang | 44 | Pringapus | 45 | | | | | | Jatirunggo | Rp400,000,000 | 46 | Patrol | 48 | Patrol Lor | Rp400,000,000 |
| | | | | 46 | Candirejo | 49 | Melung | Rp400,000,000 | | | | | | 47 | Kemambang | 49 | Neglasari | 50 | Sukaraja | Rp400,000,000 |
| | | | | 45 | Banyubiru | 47 | Kemambang | Rp400,000,000 | | | | 48 | Bawen | 48 | Rajapolah | 50 | Sukaraja | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 46 | Bawen | 48 | Poncoroso | Rp400,000,000 | | | | 49 | Karangwelas | 50 | Sunyalangu | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 30 | Banyumas | 47 | Kedungbanteng | 49 | | | | Melung | Rp400,000,000 | 50 | Cugenang | 52 | Gasol | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 48 | Karangwelas | 50 | Sunyalangu | Rp400,000,000 | | | | 51 | Cidaun | 53 | Jayapura | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 31 | Brebes | 49 | Banjarharjo | 51 | | | | Bandungsari | Rp400,000,000 | 52 | Pamijahan | 54 | Gunungsari | Rp400,000,000 | | |
| 32 | Kendal | 50 | Limbangan | 52 | Gondang | Rp400,000,000 | 53 | Sukamakmur | 55 | Sirnajaya | Rp400,000,000 | | | | | | | | | |
| 51 | Pegandon | 53 | Wonosari | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

52. Pageruyung...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
|----|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 10 | Jawa Timur | | | 52 | Pageruyung | 54 | Getasblawong | Rp400,000,000 | 11 | Jawa Tengah | 38 | Magelang | 54 | Dukun | 56 | Banyubiru | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | 33 | Sragen | 53 | Sambungmacan | 55 | | | | Bedoro | Rp400,000,000 | 55 | Sawangan | 57 | Wonolelo | Rp300,000,000 | | |
| | | | | 54 | Jenar | 56 | Banyurip | Rp400,000,000 | | | | 39 | Semarang | 56 | Pringapus | 58 | Jatirunggo | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 34 | Banjarnegara | 55 | Banjarmangu | 57 | | | | | | Kaliunjar | Rp400,000,000 | 57 | Banyubiru | 60 | Kemambang | Rp400,000,000 |
| | | | | 56 | Kalibening | 58 | Gununglangit | Rp400,000,000 | | | | | | 58 | Bawen | 61 | Poncoroso | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 35 | Purworejo | 57 | Kaligesing | 59 | | | | | | Pandanrejo | Rp400,000,000 | 59 | Kedungbanteng | 62 | Melung | Rp400,000,000 |
| | | | | 36 | Pati | 58 | Tayu | 60 | | | | Sambiroto | Rp400,000,000 | 60 | Karangwelas | 63 | Sunyalangu | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 37 | Madiun | 59 | Geger | 61 | | | | Sangen | Rp400,000,000 | 61 | Banjarharjo | 64 | Bandungsari | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 60 | Sawahan | 62 | Sidomulyo | Rp400,000,000 | | | | 62 | Kendal | 62 | Limbangan | 65 | Gondang | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 63 | Rejosari | 64 | Simo | Rp400,000,000 | | | | 63 | Pegandon | 66 | Wonosari | 67 | Getasblawong | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 61 | Balerejo | 64 | Simo | Rp400,000,000 | | | | 64 | Pageruyung | 67 | Getasblawong | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 62 | Madiun | 65 | Dimong | Rp400,000,000 | | | | 65 | Sragen | 65 | Sambungmacan | 68 | Bedoro | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 38 | Sidoarjo | 63 | Sedati | 66 | | | | Tambak Cemandi | Rp400,000,000 | 66 | Jenar | 69 | Banyurip | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 39 | Kediri | 64 | Ngadiluwih | 67 | | | | Dukuh | Rp400,000,000 | 67 | Banjarnegara | 70 | Kaliunjar | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 65 | Kayen Kidul | 68 | Sambirobyong | Rp400,000,000 | | | | 68 | Kalibening | 71 | Gununglangit | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 66 | Gurah | 69 | Krekep | Rp400,000,000 | | | | 69 | Purworejo | 69 | Kaligesing | 72 | Pandanrejo | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 67 | Grogol | 70 | Sonorejo | Rp400,000,000 | | | | 70 | Pati | 70 | Tayu | 73 | Sambiroto | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 40 | Banyuwangi | 68 | Tegabari | 71 | | | | Karangdoro | Rp400,000,000 | 71 | Wonosobo | 71 | Kertek | 74 | Bojasari | Rp300,000,000 |
| | | | | 69 | Kabat | 72 | Tambong | Rp400,000,000 | | | | 72 | Klaten | 72 | Karangdowo | 75 | Kupang | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 41 | Ngawi | 70 | Kendal | 73 | | | | Karangpupito | Rp400,000,000 | 73 | Jepara | 73 | Bangsri | 76 | Bondo | Rp300,000,000 |
| | | | | 74 | Sidorejo | Rp400,000,000 | | | | | | | | 74 | Madiun | 74 | Geger | 77 | Sangen | Rp400,000,000 |
| 42 | Pacitan | 71 | Pringkuku | 75 | Tamanasri | Rp400,000,000 | 75 | Sawahan | 78 | Sidomulyo | 78 | Rejosari | Rp400,000,000 | | | | | | | |
| 76 | Balerejo | 80 | Simo | Rp400,000,000 | 76 | Ponorogo | 72 | Sambit | 76 | Wringinanom | Rp400,000,000 | | | | | | | | | |
| 77 | Jambon | 77 | Jambon | Rp400,000,000 | 77 | Sampang | 73 | Jambon | 77 | Jambon | Rp400,000,000 | | | | | | | | | |
| 78 | Jurug | 78 | Jurug | Rp300,000,000 | 78 | | 74 | Soko | 78 | Jurug | Rp300,000,000 | | | | | | | | | |
| 79 | Bira Tengah | 79 | Bira Tengah | Rp300,000,000 | 79 | | 75 | Sokobanah | 79 | Bira Tengah | Rp300,000,000 | | | | | | | | | |
| 82 | Tambak Cemandi | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

45. Bangkalan...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|----|------------------|----|---------------------|----|---------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 45 | Bangkalan | 76 | Labang | 80 | Sukolilo Barat | Rp400,000,000 | | | 52 | Kediri | 79 | Ngadiluwih | 83 | Dukuh | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 77 | Tanah Barat | 81 | Batangan | Rp400,000,000 | | | | | 80 | Kayen Kidul | 84 | Sambirobyong | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 78 | Socah | 82 | Parseh | Rp400,000,000 | | | | | 81 | Gurah | 85 | Krekep | Rp400,000,000 | | |
| | | 46 | Mojokerto | 79 | Gondang | 83 | Kebontunggul | Rp400,000,000 | | | 82 | Grogol | 86 | Sonorejo | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 47 | Pamekasan | 80 | Waru | 84 | | | Waru Barat | Rp300,000,000 | 53 | Banyuwangi | 83 | Tegalsari | 87 | Karangdoro | Rp400,000,000 |
| | | 81 | Dongko | | | 85 | Petung | Rp400,000,000 | | | 84 | Kabat | | | 88 | Tambong | Rp400,000,000 | | |
| | | 48 | Trenggalek | 82 | Tugu | 86 | Ngepoh | Rp400,000,000 | | | 54 | Ngawi | 86 | Kendal | 90 | Karanggipito | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 49 | Jombang | 83 | Ngoro | 87 | | | | | Kesamben | Rp400,000,000 | 85 | Blimbingsari | 89 | Bomo | Rp400,000,000 |
| | | | | | | 84 | Kabuh | 88 | | | | | Tanjungwadung | Rp400,000,000 | 56 | Ponorogo | 88 | Sambit | 93 |
| | | 50 | Blitar | 86 | Sanankulon | 91 | Sumberingin | Rp400,000,000 | | | 89 | Jambon | 94 | Jambon | | | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 87 | Wilingi | 92 | Tembalang | Rp400,000,000 | | | 90 | Soko | 95 | Jurug | Rp300,000,000 | | | | |
| | | 51 | Jember | 88 | Puger | 93 | Wonosari | Rp400,000,000 | | | 57 | Sampang | 92 | Sokobanah | 97 | Bira Tengah | Rp300,000,000 | | |
| | | | | 89 | Batukliang Utara | 95 | Aik Bukak | Rp400,000,000 | | | | | 58 | Bangkalan | 93 | Labang | 98 | Sukolilo Barat | Rp400,000,000 |
| | | 11 | Nusa Tenggara Barat | 52 | Lombok Tengah | 90 | Inere | Rp350,000,000 | | | 94 | Tanah Barat | | | 99 | Batangan | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 12 | Nusa Tenggara Timur | 53 | Ngada | 96 | | | Paupaga | Rp350,000,000 | | | 95 | Socah | 100 | Parseh | Rp400,000,000 |
| 13 | Kalimantan Barat | 54 | Kubu Raya | | | 91 | Sungai Kakap | 97 | Jeruju Besar | Rp400,000,000 | 59 | Mojokerto | 96 | Gondang | 101 | Kebontunggul | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 98 | Sungai Kupah | Rp400,000,000 | 97 | Mojoanyar | 102 | Kwatu | | | Rp300,000,000 | | | | | | |
| | | 55 | Melawi | 92 | Sayan | 99 | Landau Sadak | Rp400,000,000 | 60 | Pamekasan | 98 | Waru | 103 | Waru Barat | Rp300,000,000 | | | | |
| | | 56 | Sekadau | 93 | Nanga Taman | 100 | Pantok | Rp400,000,000 | | | 61 | Trenggalek | 99 | Dongko | 104 | Petung | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 94 | Nanga Mahap | 101 | Tamang | Rp400,000,000 | 100 | Tugu | | | 105 | Ngepoh | Rp350,000,000 | | | | |
| 14 | Kalimantan Timur | 57 | Sambas | 95 | Jawai Selatan | 102 | Jawai Laut | Rp400,000,000 | 62 | Jombang | 101 | Ngoro | 106 | Kesamben | Rp400,000,000 | | | | |
| | | 58 | Berau | 96 | Biduk-Biduk | 103 | Teluk Sumbang | Rp400,000,000 | | | 102 | Kabuh | 107 | Tanjungwadung | Rp400,000,000 | | | | |
| | | 59 | Kutai Kertanegara | 97 | Tenggarong Seberang | 104 | Manunggal Jaya | Rp400,000,000 | | | 103 | Wonosalam | 108 | Carangwulung | Rp400,000,000 | | | | |
| | | 60 | Kutai Timur | 98 | Muara Bengkal | 105 | Muara Bengkal Ulu | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | | |

99. Bengalon...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
|-----|-----------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 15 | Sulawesi Selatan | 61 | Gowa | 99 | Bengalon | 106 | Sekerat | Rp400,000,000 | | | 63 | Blitar | 104 | Sanankulon | 110 | Sumberingin | Rp400,000,000 | | |
| | | | | | | 107 | Bringala | Rp400,000,000 | 105 | Wilingi | | | | | 111 | Tembalang | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 62 | Takalar | 101 | Polongbangkeng Utara | 108 | Kale Ko'mara | Rp400,000,000 | | | 64 | Jember | 106 | Puger | 112 | Wonosari | Rp350,000,000 | | |
| | | | | | | 102 | Mengkendek | 109 | Pa'tengko | Rp400,000,000 | | | | | 65 | Gresik | 107 | Ujungpangkah | 113 | Sekapak | Rp300,000,000 |
| | | | | 63 | Tana Toraja | 103 | Malimbong Balepe | 111 | Kolesawangan | Rp400,000,000 | | | 66 | Pasuruan | | | 108 | Winongan | 114 | Sumberrejo | Rp300,000,000 |
| | | | | | | 110 | Randanan | Rp400,000,000 | 67 | Nganjuk | | | | | 109 | Leceret | 115 | Ngepoh | Rp300,000,000 | | |
| | | | | 64 | Luwu Utara | 104 | Malangke | 112 | | | | | Waelawi | Rp400,000,000 | 13 | Nusa Tenggara Barat | 68 | Lombok Tengah | 110 | Batukliang Utara | 116 |
| | | | | | | 105 | Wasuponda | 113 | Ledu-Ledu | Rp400,000,000 | | | 69 | Lombok Timur | | | 111 | Lenek | 118 | Lenek Ramban Biak | Rp400,000,000 |
| | | | | | | 106 | Nuha | 114 | Matano | Rp400,000,000 | | | 14 | Nusa Tenggara Timur | | | 70 | Ngada | 112 | Inere | 119 |
| | | | | 115 | Sorowako | Rp400,000,000 | 15 | Kalimantan Barat | 72 | Kubu Raya | | | | | 113 | Sungai Kakap | 120 | Jeruju Besar | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 116 | Angkue | Rp400,000,000 | | | 73 | Melawi | | | 114 | Sayan | 122 | Landau Sadak | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 117 | Umpungeng | Rp400,000,000 | | | | | | | 74 | Sekadau | 115 | Nanga Taman | 123 | Pantok | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 118 | Lampoloang | Rp400,000,000 | | | 75 | Sambas | | | | | 116 | Nanga Mahap | 124 | Tamang | Rp400,000,000 | | |
| | | | | 119 | Tonra Lipue | Rp400,000,000 | | | | | | | 117 | Jawai Selatan | 125 | Jawai Laut | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | 120 | Gromani | Rp400,000,000 | 16 | Kalimantan Timur | 77 | Berau | | | 118 | Biduk-Biduk | 126 | Teluk Sumbang | Rp400,000,000 | | | | |
| 121 | Malimpung | Rp400,000,000 | 76 | Kutai Kertanegara | 119 | Tenggarong Seberang | | | 127 | Manunggal Jaya | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | |
| 69 | Pinrang | 112 | Patampanua | 121 | Labone | Rp400,000,000 | 77 | Kutai Timur | 120 | Muara Bengkal | 128 | Muara Bengkal Ulu | Rp400,000,000 | | | | | | | | |
| | | 113 | Lasalepa | 122 | Labone | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Muna | 114 | Tongkundo | 123 | Dempu | Rp400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

17. Sulawesi...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|----|-------------------|----|-----------------|-----|---------------|-----|-----------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 17 | Sulawesi Tengah | 71 | Morowali | 115 | Bungku Tengah | 124 | Matansala | Rp400,000,000 | 17 | Sulawesi Selatan | 78 | Gowa | 121 | Bengalon | 129 | Sekerat | Rp400,000,000 | | |
| 18 | Sulawesi Utara | 72 | Minahasa | 116 | Sonder | 125 | Timbukar | Rp400,000,000 | 79 | Takalar | 123 | Polongbangkeng Utara | 131 | Kale Ko'mara | | Bringala | Rp400,000,000 | | |
| 19 | Papua Barat | 73 | Sorong Selatan | 117 | Teminabuan | 126 | Aibobor | Rp400,000,000 | 80 | Tana Toraja | 124 | Mengkendek | 132 | Pa'tengko | | Randanan | Rp400,000,000 | | |
| | | | | | | | | TOTAL | Rp49,450,000,000 | 125 | Malimbong Balepe | 134 | Kolesawangan | | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 126 | Sanggala | 135 | Turunan | | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 81 | Toraja Utara | 127 | Sanggalangli | 136 | Pata' Padang | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 82 | Luwu Utara | 128 | Malangke | 137 | Waelawi | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 129 | Wasuponda | 138 | Ledu-Ledu | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 130 | Seko | 139 | Lodang | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 83 | Luwu Timur | 131 | Nuha | 140 | Matano | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 141 | Sorowako | | | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 84 | Bone | 132 | Kajuara | 142 | Angkue | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 85 | Soppeng | 133 | Lalabata | 143 | Umpungeng | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 86 | Wajo | 134 | Pitumpanue | 144 | Lampoloang | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 135 | Tanasitolo | 145 | Tonra Lipue | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 136 | Keera | 146 | Ciromani | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 87 | Pinrang | 137 | Patampanua | 147 | Malimpung | | | Rp400,000,000 | |
| 18 | Sulawesi Barat | 88 | Poliwali Mandar | 138 | Wonomulyo | 148 | Campurjo | Rp350,000,000 | 18 | Sulawesi Barat | 88 | Poliwali Mandar | 138 | Wonomulyo | 148 | Campurjo | Rp350,000,000 | | |
| 19 | Sulawesi Tenggara | 89 | Muna | 139 | Lasalepa | 149 | Labone | Rp400,000,000 | 19 | Sulawesi Tenggara | 89 | Muna | 139 | Lasalepa | 149 | Labone | Rp400,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | 140 | Tongkundo | 150 | Oempu | | | Rp400,000,000 | | | |

20. Sulawesi...


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|----|-------------------|----|-----------------|-----|---------------|-----|-----------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 17 | Sulawesi Tengah | 71 | Morowali | 115 | Bungku Tengah | 124 | Matansala | Rp400,000,000 | 17 | Sulawesi Selatan | 78 | Gowa | 121 | Bengalon | 129 | Sekerat | Rp400,000,000 | | |
| 18 | Sulawesi Utara | 72 | Minahasa | 116 | Sonder | 125 | Timbukar | Rp400,000,000 | 79 | Takalar | 123 | Polongbangkeng Utara | 131 | Kale Ko'mara | | Bringala | Rp400,000,000 | | |
| 19 | Papua Barat | 73 | Sorong Selatan | 117 | Teminabuan | 126 | Aibobor | Rp400,000,000 | 80 | Tana Toraja | 124 | Mengkendek | 132 | Pa'tengko | | Randanan | Rp400,000,000 | | |
| | | | | | | | | TOTAL | Rp49,450,000,000 | 125 | Malimbong Balepe | 134 | Kolesawangan | | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 126 | Sanggala | 135 | Turunan | | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 81 | Toraja Utara | 127 | Sanggalangli | 136 | Pata' Padang | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 82 | Luwu Utara | 128 | Malangke | 137 | Waelawi | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 129 | Wasuponda | 138 | Ledu-Ledu | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 130 | Seko | 139 | Lodang | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 83 | Luwu Timur | 131 | Nuha | 140 | Matano | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 141 | Sorowako | | | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 84 | Bone | 132 | Kajuara | 142 | Angkue | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 85 | Soppeng | 133 | Lalabata | 143 | Umpungeng | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 86 | Wajo | 134 | Pitumpanue | 144 | Lampoloang | | | Rp400,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 135 | Tanasitolo | 145 | Tonra Lipue | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 136 | Keera | 146 | Ciromani | | | Rp400,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 87 | Pinrang | 137 | Patampanua | 147 | Malimpung | | | Rp400,000,000 | |
| 18 | Sulawesi Barat | 88 | Poliwali Mandar | 138 | Wonomulyo | 148 | Campurjo | Rp350,000,000 | 18 | Sulawesi Barat | 88 | Poliwali Mandar | 138 | Wonomulyo | 148 | Campurjo | Rp350,000,000 | | |
| 19 | Sulawesi Tenggara | 89 | Muna | 139 | Lasalepa | 149 | Labone | Rp400,000,000 | 19 | Sulawesi Tenggara | 89 | Muna | 139 | Lasalepa | 149 | Labone | Rp400,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | 140 | Tongkundo | 150 | Oempu | | | Rp400,000,000 | | | |

20. Sulawesi...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
|----|-----------------|----|------------------|-----|---------------|-----|------------------|---------------|-----------|-----|----------|---------------|
| 20 | Sulawesi Tengah | 90 | Morowali | 142 | Bungku Tengah | 151 | Matansala | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | 152 | Tofuti | Rp400,000,000 | | | | |
| 21 | Sulawesi Utara | 91 | Minahasa | 143 | Sonder | 153 | Timbukar | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | 92 | Sangihe | 144 | Tatoareng | 154 | Para | Rp400,000,000 |
| | | | | | | 93 | Kepulauan Talaud | 145 | Lirung | 155 | Musi | Rp300,000,000 |
| 22 | Maluku Utara | 94 | Halmaheera Barat | 146 | Jailolo | 156 | Gamtala | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | 95 | Halmaheera Utara | 147 | Tobelo | 157 | Lina Ino | Rp400,000,000 |
| 23 | Papua Barat | 96 | Sorong Selatan | 148 | Teminabuan | 158 | Albobor | Rp400,000,000 | | | | |
| | | | | | | 97 | Sorong | 149 | Klabot | 159 | Indiwi | Rp400,000,000 |

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 01 September 2023
 DIREKTUR JENDERAL
 PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,


 SUGITO, S.Sos., M.H.
 NIP. 19720602199302001 001

Lampiran 4. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 487.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN
POTENSI PARIWISATA TERPADU DI KAWASAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Kepariwisataaan...

Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);

10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA TERPADU DI KAWASAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Program Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, sebanyak Desa dengan anggaran sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Ditjen PDP;
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NOMOR 487.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN
POTENSI PARIWISATA TERPADU DI
KAWASAN PERDESAAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA TERPADU DI KAWASAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI |
|-------|---------------------|----|---------------|----|------------------|----|----------------|-----------------|
| 1 | Nusa Tenggara Barat | 1 | Lombok Timur | 1 | Aikmel | 1 | Toya | Rp400,000,000 |
| | | 2 | Lombok Tengah | 2 | Batukliang Utara | 2 | Karang Sidemen | Rp300,000,000 |
| | | 3 | Sumbawa | 3 | Moyo Hilir | 3 | Poto | Rp300,000,000 |
| 2 | Papua Barat | 4 | Raja Ampat | 4 | Waigeo Selatan | 4 | Saonek | Rp400,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp1.400,000,000 |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Lampiran 5. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 486.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN
AMENITAS WISATA TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023, maka perlu adanya Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas...

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan...

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN AMENITAS WISATA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Lokasi dan Alokasi Program Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Jumlah lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, sebanyak 8 Desa dengan anggaran sebesar Rp2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA....

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Ditjen PDP;
11. Yang bersangkutan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Ditjen PDP;
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NOMOR 486.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN
AMENITAS WISATA TAHUN ANGGARAN 2023.

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN AMENITAS WISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI |
|--------------|---------------------|----|-------------------|----|--------------------|----|-------------|------------------------|
| 1 | Sumatera Utara | 1 | Langkat | 1 | Salapia | 1 | Naman Jahe | Rp400,000,000 |
| 2 | Sumatera Selatan | 2 | Musi Banyuasin | 2 | Keluang | 2 | Tegal Mulyo | Rp300,000,000 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 3 | Alor | 3 | Lembur | 3 | Tulleng | Rp400,000,000 |
| | | 4 | Sumba Barat | 4 | Tana Righu | 4 | Manu Kuku | Rp400,000,000 |
| 4 | Sulawesi Tengah | 5 | Toli-Toli | 5 | Galang | 5 | Malangga | Rp300,000,000 |
| | | 6 | Donggala | 6 | Sindue Tombusabora | 6 | Batusuya | Rp400,000,000 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 7 | Sidenreng Rappang | 7 | Pitu Riase | 7 | Compong | Rp400,000,000 |
| 6 | Maluku | 8 | Buru Selatan | 8 | Namrole | 8 | Wali | Rp300,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp2,900,000,000 |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Ss., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NOMOR 486.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN
AMENITAS WISATA TAHUN ANGGARAN 2023.

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN AMENITAS WISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI |
|--------------|---------------------|----|-------------------|----|--------------------|----|-------------|------------------------|
| 1 | Sumatera Utara | 1 | Langkat | 1 | Salapia | 1 | Naman Jahe | Rp400,000,000 |
| 2 | Sumatera Selatan | 2 | Musi Banyuasin | 2 | Keluang | 2 | Tegal Mulyo | Rp300,000,000 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 3 | Alor | 3 | Lembur | 3 | Tulleng | Rp400,000,000 |
| | | 4 | Sumba Barat | 4 | Tana Righu | 4 | Manu Kuku | Rp400,000,000 |
| 4 | Sulawesi Tengah | 5 | Toli-Toli | 5 | Galang | 5 | Malangga | Rp300,000,000 |
| | | 6 | Donggala | 6 | Sindue Tombusabora | 6 | Batusuya | Rp400,000,000 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 7 | Sidenreng Rappang | 7 | Pitu Riase | 7 | Compong | Rp400,000,000 |
| 6 | Maluku | 8 | Buru Selatan | 8 | Namrole | 8 | Wali | Rp300,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp2,900,000,000 |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Lampiran 6. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 490.4.3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN NOMOR 294.4.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN
REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi pasar Desa, diperlukan bantuan pembangunan sarana dan prasarana selanjutnya dilakukan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan dinamika dan kondisi dilapangan serta perkembangan situasi maka perlu adanya penyesuaian lokasi dan alokasi bantuan, sehingga dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 294.4.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 294.4.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359)
11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN NOMOR 294.4.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan lokasi dan alokasi penerima bantuan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi pasar Desa tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, sebanyak 30 pasar Desa dengan anggaran sebesar Rp9.900.000.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602199302001 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para pejabat eselon 2 di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan;
11. Yang bersangkutan.

5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN
NOMOR 490/4.3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN NOMOR 294.4.3
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN,
DAN REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN REHABILITASI PASAR DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

| SEMULA | | | | | | | | | MENADI | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|-----------|----|-----------|----|------------|---------------|--------|------------|----|-------------|----|---------------|----|-------------|---------------|
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI | NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | ALOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Jawa Tengah | 1 | Magelang | 1 | Salam | 1 | Sirahan | Rp400,000,000 | 1 | Jawa Barat | 1 | Tasikmalaya | 1 | Taraju | 1 | Taraju | Rp400,000,000 |
| | | 2 | Pati | 2 | Trangkil | 2 | Kertomulyo | Rp400,000,000 | | | 2 | Cianjur | 2 | Sindangbarang | 2 | Muaracikadu | Rp400,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 3 | Magelang | 3 | Salam | 3 | Sirahan | Rp400,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 4 | Bandongan | 4 | Rejosari | 4 | Rejosari | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 5 | Pati | 5 | Trangkil | 5 | Kertomulyo | Rp400,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 6 | Temanggung | 6 | Kandangan | 6 | Kandangan | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 7 | Wonosobo | 7 | Kalibawang | 7 | Kalikarung | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 8 | Batang | 8 | Bawang | 8 | Candigugur | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 9 | Grobogan | 9 | Purwodadi | 9 | Kedungwungu | Rp300,000,000 |

3. Jawa...

6

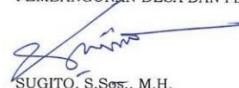
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|-------------|----|---------------|----|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | 3 | Jawa Timur | 9 | Trenggalek | 10 | Trenggalek | 10 | Dawuhan | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 10 | Probolinggo | 11 | Pajajaran | 11 | Gejagan | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 11 | Ngawi | 12 | Mantingan | 12 | Tambakboyo | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 12 | Jember | 13 | Kalisat | 13 | Glagahwero | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 13 | Lumajang | 14 | Tempursari | 14 | Tempursari | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 14 | Bangkalan | 15 | Socah | 15 | Pernajuh | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 15 | Sampang | 16 | Sampang | 16 | Banyumas | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 17 | Camplong | 17 | Batu Karang | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 16 | Pamekasan | 18 | Pakoh | 18 | Klompang Barat | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 19 | Palengan | 19 | Palengan Lask | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 17 | Sumenap | 20 | Lenteng | 20 | Ellak Daya | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 18 | Magetan | 21 | Lendeyan | 21 | Kedungpanji | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 19 | Sidoarjo | 22 | Tangulagin | 22 | Katega | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 20 | Situbondo | 23 | Bungatan | 23 | Bletok | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 21 | Ponorogo | 24 | Kidung | 24 | Wagirkidul | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 22 | Jember | 25 | Gumuk Mas | 25 | Wagorejo | Rp300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 23 | Pasuruan | 26 | Gondang Wetan | 26 | Raggeh | Rp300,000,000 |

4. Nusa...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|---------------------|----|--------------------|----|-----------------|----|----------------|-----------------|
| 4 | Nusa Tenggara Barat | 24 | Lombok Tengah | 27 | Pujut | 27 | Tumpak | Rp400,000,000 |
| 5 | Sulawesi Barat | 25 | Polewali Mandar | 28 | Tinambung | 28 | Batulaya | Rp300,000,000 |
| 6 | Maluku Utara | 26 | Halimahera Barat | 29 | Jailolo Selatan | 29 | Sidangoli Dehe | Rp500,000,000 |
| | | 27 | Halimahera Selatan | 30 | Pulau Makian | 30 | Walo | Rp500,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp9,900,000,000 |

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal September 2023
 DIREKTUR JENDERAL
 PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
 NIP. 19720602199302001 001

Lampiran 7. Dokumen Surat Tugas Kelompok Kerja dan Pembagian Lokus Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19

www.kemendes.go.id

SURAT TUGAS

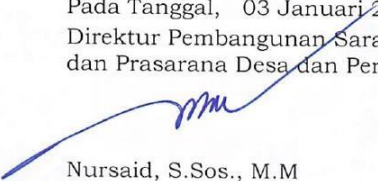
Nomor : 3/PDP.01/2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kepmendesa PDTT Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Surat Tugas dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Dasar :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-067.03.1.350456/2023 Tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;

Menugaskan

- Kepada : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini;
- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan Tahun Anggaran 2023;
 2. Bertanggungjawab melaksanakan proses kegiatan bantuan mulai dari Sosialisasi, Identifikasi, Perjanjian Kerja Bersama, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pada lokasi bantuan sebagaimana terlampir;
 3. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membidangi agar tercipta sinergitas pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
 4. Demikian, Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa dan Perdesaan,


Nursaid, S.Sos., M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

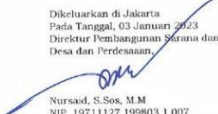
Tembusan:

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

| No | Pokja | Nama | Penanggungjawab / Koordinator Kegiatan |
|----|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | I | Fredriego Tanggu Dendo, S.K.H, MM | 1. Sarana Pelayanan Dasar yang Dibangun/Dikembangkan/ Direhabilitasi a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 2. Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 3. Lomba Desa Wisata Nusantara |
| 2 | II | Ir. Iwan Yuladi Budi Irawan, MM | 1. Jalan untuk Mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang Dibangun a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 2. Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan |
| 3 | III | Dra. Sari Arta Uti Arionang, MM | 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa dan Pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 2. Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan |

| | | | |
|---|----|-------------------------|--|
| 4 | IV | Rini Nuraini, S.H, M.Si | 1. Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang Dibangun a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 2. Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan |
| 5 | V | Joko Priyanto, M.Si | 1. Amenitas wisata yang dibangun / dikembangkan a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan 2. Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata a. Sosialisasi b. Identifikasi c. Perjanjian Kerja Bersama d. Monev dan Pelaporan |

Dikeluarkan di Jakarta
 Pada Tanggal, 03 Januari 2023
 Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Desa dan Perdesaan


 Nursad, S.Sos, M.M
 NIP. 19711127 199803 1 007

KELOMPOK KERJA DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | KELOMPOK KERJA 1 | KELOMPOK KERJA 2 | KELOMPOK KERJA 3 | KELOMPOK KERJA 4 | KELOMPOK KERJA 5 | JABATAN |
|----|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Fredringko Tangu Dendo | Iwan Yuliadi Budi Irawan | Sari Arta Uli Artonang | Rini Nuraini | Joko Priyanto | KETUA |
| 2 | Novrizal Wahyudi | Titik Alfah | Muhammad Mufti Almalak | Zamrudin Ikram | Midian Petra Halomoan | WAKIL KETUA I |
| 3 | Husni Muh Nur Pua Upa | Arief Mulyawan | Al Fatah Yasin | Poltak | Sri Wahyuni | WAKIL KETUA II |
| 4 | Tri Siska Windarti | Nur Sugianti | Ayu Sri Lestari | Kristyarin Dwi Anggita | Betharia Pardosi | ANGGOTA |
| 5 | Riyan Rizki Fauzi | Apriska Sagita M | M. Kabul Rizki | Cahyo Wahyu Nugroho | Rathan Syawah | ANGGOTA |
| 6 | Nancy Gloria | Indah Sefriyanti | Fauzy Ade Priyatna | Rizky Apriyan | Ananda Ghifari Firdausyah | ANGGOTA |
| 7 | Rizky Anita Putri | Fathimatuz Zahro | Fransiska Puspa Putri A | Ikhfadhulhikmy Kurnia Bt | Egit Putra | ANGGOTA |
| 8 | Yanward Meka Romy K | Khairil Marpaung | Renny Julianti | Ajar Widhianto | Arta Oktoryna Sihite ** | ANGGOTA |
| 9 | Nabila Nurul M *** | Bram Dimas Adhi Prasetya | Zumrotus Sholihah | | | ANGGOTA |
| 10 | Aimun Nurma W * | Sibbil Rusdianan Adriyani** | | | | ANGGOTA |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaan,

Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Keterangan :

- * Penempatan TU Dirjen
- ** Penempatan Sekretariat
- *** Tugas Belajar

TENAGA PENDUKUNG KELOMPOK KERJA DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN

| NO | KELOMPOK KERJA 1 | KELOMPOK KERJA 2 | KELOMPOK KERJA 3 | KELOMPOK KERJA 4 | KELOMPOK KERJA 5 |
|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Rully Irawan | Muhammad Setianto | Aulya Puspitasari | Siti Chadajah | Raksa Gumelar Noor Alamsyah |
| 2 | Bambang Apriyanto | Slamet Raharjo | Muh. Nur | Kadarwinsyah | Helmi Agusriadi |
| 3 | Indah Yunitasari | Saydah Zaenab | Arief Muttaqien | Nurul Hidayati | Sustina Ardiningsih |
| 4 | Shinta Harjanti | Fiska Ambarwati | Bambang PR | Risalatul Maunah | Neng Ummu Kulsum |
| 5 | Rahmat Hidayat | Muhammad Rizky Basuki | Ahmad Said | Dicky Kurniawan | Wahid Ilham |
| 6 | Rizky Chondro Juherwanto | Abdus Salam | Anita Surahmawati | Khoirul Aziz | La Ode Jumadil |
| 7 | Furqon | Rahmad Hidayat | Cita Ramasari * | Nur Rachmawaty | Imron Rosadi |
| 8 | Rifqi Novianti | | | Taryani | |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaan,

Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

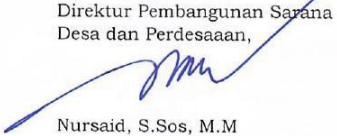
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK Mendukung
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH I
 TAHUN 2023**

| No | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|---------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Aceh | 1 | Pidie | Keumala | 1 Riyeun Seretoh | Rp 400,000,000 | |
| 2 | Jambi | 1 | Kerinci | Tanah Cogok | 1 Baru Semerah | Rp 400,000,000 | |
| 3 | Jawa Barat | 1 | Bogor | | 1 | Rp 400,000,000 | |
| | | | | | 2 | Rp 400,000,000 | |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | Banyumas | Kedungbanteng | 1 Melung | Rp 400,000,000 | |
| | | | | Karangwelas | 2 Sunyalangu | Rp 400,000,000 | |
| 5 | Jawa Timur | 1 | Kediri | Gurah | 1 Krekep | Rp 400,000,000 | |
| | | | | Ngadiluwih | 2 Dukuh | Rp 400,000,000 | |
| | | | | Kayen Kidul | 3 Padangan | Rp 400,000,000 | |
| | | 2 | Pacitan | Pringkuku | 1 Tamansari (Wisata Bukit Tompe) | Rp 400,000,000 | |
| | | | | 3 | Ponorogo | | 1 |
| | | Jambon | 2 Jambon | | | Rp 400,000,000 | |
| | | Sooko | 3 Jurug | | | Rp 300,000,000 | |
| | | 4 | Trenggalek | Dongko | 1 | Petung | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 350,000,000 |
| | | 6 | Kalimantan Timur | 1 | Kutai Kertanegara | Tenggarong Seberang | 1 Manunggal Jaya |
| 2 | Kutai Timur | | | | | Bengalon | 1 Sekerat |
| | | | | | | Muara Bengkal | 2 Muara Bengkal Ulu |
| 7 | Kepulauan Riau | 1 | Natuna | Bunguran Timur | 1 Batu Gajah | Rp 400,000,000 | |
| | | | | | | Serasan | 2 Tanjung Setulun |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | 1 | Nagekeo | | 1 | Rp 350,000,000 | |
| 9 | Sulawesi Barat | 1 | Polewali Mandar | | 1 | Rp 350,000,000 | |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH I
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|---|------------------|----------------|---|------------------------|----------------|
| 10 | Sulawesi Selatan | 1 | Bone | Kajuara | 1 | Angkue | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Soppeng | Lalabata | 1 | Umpungeng | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Wajo | Majauleng | 1 | Macanang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tanasitolo | 2 | Tonra Lipue | Rp 400,000,000 |
| | | | | Keera | 3 | Ciromani | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sulawesi Utara | 1 | Minahasa | Sonder | 1 | Kauneran | Rp 400,000,000 |
| 12 | Sumatera Barat | 1 | Kota Pariaman | Pariaman Utara | 1 | Kampung Baru Padusunan | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Padang Pariaman | Sungai Limau | 1 | Guguak Kuranji Hilir | Rp 400,000,000 |
| 13 | Sumatera Selatan | 1 | Empat Lawang | Lintang Kanan | 1 | Muara Danau | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Musi Rawas Utara | Rupit | 1 | Sungai Jernih | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 13
Kabupaten 21
Desa 32

Lampiran 5
 Nomor : 3/PDP.01/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

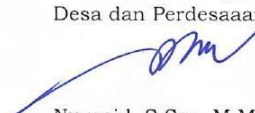
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
 Mendukung Destinasi Pariwisata Kelompok Kerja (POKJA) Wilayah II
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | Jambi | 1 | Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | 1 | Muaro Pijoan | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Cianjur | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Magelang | Dukun | 1 | Banyubiru | Rp 400,000,000 |
| | | | | 2 | Semarang | Pringapus | 1 |
| | | Pringapus | 2 | | | Candirejo | Rp 400,000,000 |
| | | Pabelan | 3 | | | Pabelan | Rp 400,000,000 |
| | | Banyubiru | 4 | | | Kemambang | Rp 400,000,000 |
| | | Bawen | 5 | Poncoruso | Rp 400,000,000 | | |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Jember | | 1 | | Rp 350,000,000 |
| | | | | 2 | Madiun | Geger | 1 |
| | | Sawahan | 2 | | | Sidomulyo | Rp 400,000,000 |
| | | Sawahan | 3 | | | Rejosari | Rp 400,000,000 |
| | | Balerejo | 4 | | | Simo | Rp 400,000,000 |
| | | Madiun | 5 | | | Dimong | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Sidoarjo | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| 5 | Kalimantan Barat | 1 | Kubu Raya | Sungai Kakap | 1 | Jeruju Besar | Rp 400,000,000 |
| | | | | Sungai Kakap | 2 | Sungai Kupah | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sambas | Jawai Selatan | 3 | Jawai Laut | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH II
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|---------------------|---|-------------------|----------------------|------|---|----------------|
| 6 | Lampung | 1 | Lampung Timur | | 1 | Rp 400,000,000 | |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 1 | Lombok Tengah | Batukliang Utara | 1 | Mas Mas | Rp 400,000,000 |
| | | | | Batukliang Utara | 2 | Aik Bukak | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Rokan Hilir | Tanjung Medan | 1 | Tanjung Medan | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Rokan Hulu | Rambah Samo | 2 | Rambah Utama | Rp 400,000,000 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 1 | Gowa | Barombong | 1 | Bringala | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Pangkep | Tondong Tallasa | 2 | Bantimurung | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Takalar | Polongbangkeng Utara | 3 | Kale Ko'mara (Kawasan Wisata Timurung) | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | 1 | Jorong Lurah Bukit Nagari Balai Panjang | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Selatan | 1 | Ogan Komering Ulu | Kota Kayuagung | 2 | Teloko | Rp 400,000,000 |
| 12 | Sumatera Utara | 1 | Karo | Munthe | 1 | Gunung Saribu | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 12
Kabupaten 19
Desa 30

Lampiran 6
 Nomor : 3/PDP.01/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

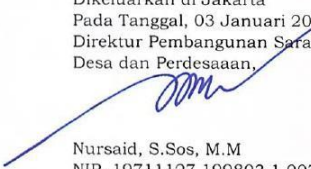
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH III
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI |
|----|---------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Jambi | 1 | Sarolangun | Batang Asai | 1 Lubuk Bangkar | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Bandung Barat | Sindangkerta | 1 Pasirpogor | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Ciamis | Sindangkasih | 2 Gunungcupu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rajadesa | 3 Rajadesa | Rp 300,000,000 |
| | | 3 | Sumedang | Jatigede | 1 Kadujaya | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Brebes | Bandungsari | 1 Banjarharjo (Wisata Pancuran Mas) | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kendal | Limbangan | 1 Gondang |
| | | Pegandon | 2 Wonosari | | Rp 400,000,000 | |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Banyuwangi | Genteng | 1 Genteng Kulon | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tegalsari | 2 Karangdoro | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kabat | 3 Tambong | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Mojokerto | Gondang | 1 Kebuntunggul | Rp 400,000,000 |
| 5 | Lampung | 1 | Lampung Utara | Sungkai Utara | 1 | Rp 400,000,000 |
| 6 | Nusa Tenggara Barat | 1 | Lombok Timur | Lenek | 1 Lenek Ramban Biak | Rp 400,000,000 |
| | | | | Aikmel | 2 Toya | Rp 400,000,000 |
| 7 | Riau | 1 | Siak | Dayun | 1 Kp. Dayung | Rp 400,000,000 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 1 | Luwu Timur | Nuha | 1 Sorowako | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nuha | 2 Matano | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wasuponda | 3 Ledu-Ledu | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tana Toraja | Mengkendek | 1 Palipu' | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rembon | 2 Lemo Menduruk | Rp 400,000,000 |
| | | | | Mengkendek | 3 Pa'tengko | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Toraja Utara | Sa'dan | 1 Sa'dan Ulsalu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Baruppu | 2 Benteng Batu | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH III
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|-----------------|---|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 9 | Sulawesi Tengah | 1 | Donggala | Balaesang | 1 | Lombonga | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Morowali | Bungku Tengah | 1 | Matansala | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Pasaman Barat | Koto Balingka | 1 | Sikabau | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Utara | 1 | Samosir | Panguruan | 1 | Pardomuan I | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tapanuli Utara | Tarutung | 1 | Aeksiansimun | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tarutung | 2 | Hutatoruan I | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan.


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 11
Kabupaten 18
Desa 30

Lampiran 7
 Nomor : 3/PDP.01/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

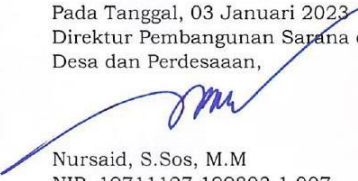
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH IV
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|--------------|---|-------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Aceh | 1 | Aceh Besar | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| 2 | Banten | 1 | Serang | Ciomas | 1 | Sukadana | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jambi | 1 | Tebo | Tebo Ulu | 1 | Teluk Kasai Rambahan | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rimbo Ulu | 2 | Suka Damai | Rp 400,000,000 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | Indramayu | Sindang | 1 | Sindang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Patrol | 2 | Patrol Lor | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tasikmalaya | Salawu | 1 | Neglasari | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rajapolah | 2 | Sukaraja | Rp 400,000,000 |
| 5 | Jawa Tengah | 1 | Pati | Tayu | 1 | Sambiroto | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sragen | Sambungmacan | 1 | Bedoro | Rp 400,000,000 |
| | | | | Jenar | 2 | Banyuruip | Rp 400,000,000 |
| 6 | Jawa Timur | 1 | Blitar | Sanankulon | 1 | Sumber | Rp 400,000,000 |
| | | | | Sanankulon | 2 | Bendowulung | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Jombang | Ngoro | 1 | Kesamben | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kabuh | 2 | Tanjungwadung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wonosalam | 3 | Carangwulung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wonosalam | 4 | Wonomerto | Rp 400,000,000 |
| 7 | Maluku Utara | 1 | Halmahera Selatan | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Indragiri Hilir | Mandah | 1 | Pulau Cawan | Rp 300,000,000 |
| | | | | 2 | Indragiri Hulu | Kempas | 1 |
| | | 3 | Kampar | | | Koto Kampar Hulu | 1 |
| | | | | Siak Hulu | 2 | Buluh Cino (Wisata Danau) | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH IV
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|---|-------------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| 9 | Selawesi Selatan | 1 | Luwu Utara | Seko | 1 | Lodang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Malangke | 2 | Waelawi | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Pinrang | Patampanua | 1 | Malimpung | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Solok | Pantai Cermin | 1 | Nagari Surian | Rp 400,000,000 |
| | | | | Lembah Gumanti | 2 | Nagari Sungai Nanam | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Selatan | 1 | Ogan Komering Ulu | Ulu Logan | 1 | Gunung Tiga | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 11
Kabupaten 16
Desa 30

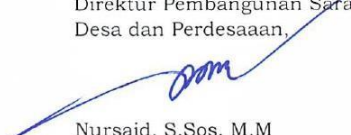
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
 Mendukung Destinasi Pariwisata Kelompok Kerja (POKJA) Wilayah V
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|------------------|---|-------------|--------------|------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Aceh | 1 | Bireuen | Kota Juang | 1 | Bireuen Meunasah TGK di Gadong | Rp 400,000,000 |
| | | | | Peudada | 2 | Blang Kubu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Matang Kuli | 3 | Mesjid Pirak | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Bandung | Banjaran | 1 | Pasirmulya | Rp 400,000,000 |
| | | | | Banjaran | 2 | Margahurip | Rp 400,000,000 |
| | | | | Arjasari | 3 | Pinggirsari | Rp 400,000,000 |
| | | | | Cimaung | 4 | Cimaung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kutawaringin | 5 | Sukamulya | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Purbalingga | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Purworejo | Kaligesing | 1 | Pandanrejo | Rp 400,000,000 |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Ngawi | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | Bringin | 2 | Dampit | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sampang | Sokobanah | 1 | Bira Tengah | Rp 300,000,000 |
| | | 3 | Pamekasan | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | 4 | Bangkalan | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| 5 | Kalimantan Barat | 1 | Sekadau | Sekadau Hulu | 1 | Tapang Perodah | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nanga Taman | 2 | Pantok | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nanga Mahap | 3 | Tamang | Rp 400,000,000 |
| 6 | Kalimantan Timur | 1 | Berau | Biduk-Biduk | 1 | Teluk Sumbang | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH V
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|-------------------|---|------------------|------------------|------|--|----------------|
| 7 | Papua Barat | 1 | Pegunungan Arfak | | 1 | Rp 400,000,000 | |
| | | 2 | Sorong Selatan | Teminabuan | 1 | Aibobor | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Bengkalis | Bandar Laksamana | 1 | Sepahat (Wisata Pantai Sepahat Pesona) | Rp 400,000,000 |
| 9 | Sulawesi Tenggara | 1 | Muna | Lasalepa | 1 | Labone | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tongkundo | 2 | Oempu | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Selatan | 1 | Banyuasin | Banyuasin II | 1 | Sungsang IV | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tungkal Ilir | 2 | Teluk Tenggulang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Airsalek | 3 | Damarwulan | Rp 400,000,000 |
| | | 1 | Musi Banyuasin | Sanga Desa | 1 | Kemang | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 03 Januari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 10
Kabupaten 16
Desa 30

Lampiran 8. Dokumen Surat Tugas Pelaksana Identifikasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19
www.kemendes.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 51/PDP.01/2023

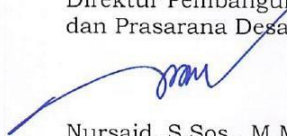
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan , Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk Tim Identifikasi Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Surat Tugas dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-067.03.1.350456/2023 Tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan:

Menugaskan

Kepada : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini;

- Untuk :
1. Melaksanakan identifikasi kegiatan program Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir;
 2. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membidangi agar tercipta sinergitas pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
 3. Demikian, Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa dan Perdesaan,


Nursaid, S.Sos., M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Tembusan:

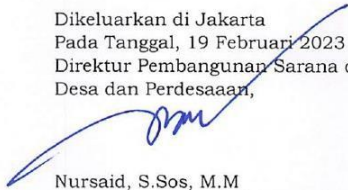
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Lampiran 1
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH I

| No | Nama | Jabatan |
|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Fredringko Tangu Dendo, S.K.H, MM | Ketua |
| 2. | Novrizal Wahyudi | Wakil Ketua I |
| 3. | Husni Muh Nur Pua Upa | Wakil Ketua II |
| 4. | Tri Siska Windarti | Anggota |
| 5. | Riyan Rizki Fauzi | Anggota |
| 6. | Nancy Gloria | Anggota |
| 7. | Rizqy Anita Putri | Anggota |
| 8. | Yanward Meka Romy K | Anggota |
| 9. | Nabila Nurul M | Anggota |
| 10. | Ainun Nurma W | Anggota |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Lampiran 2

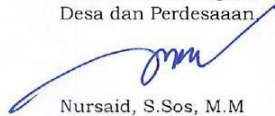
Nomor : 51/PDP.01/2023

Tanggal : 19 Februari 2023

TENAGA PENUNJANG TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH I

1. Rully Irawan
2. Bambang Apriyanto
3. Indah Yunitasari
4. Shinta Harjanti
5. Rahmat Hidayat
6. Neng Ummu Kulsum
7. Furqon

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

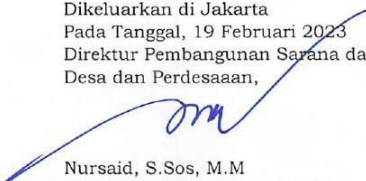
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK Mendukung
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH I
 TAHUN 2023**

| No | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | | |
|----|---------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Aceh | 1 | Pidie | Keumala | 1 Riyeun Seretoh | Rp 400,000,000 | | |
| 2 | Jambi | 1 | Kerinci | Tanah Cogok | 1 Baru Semerah | Rp 400,000,000 | | |
| 3 | Jawa Barat | 1 | Bogor | | 1 | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | | 2 | Rp 400,000,000 | | |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | Banyumas | Kedungbanteng | 1 Melung | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | Karangwelas | 2 Sunyalangu | Rp 400,000,000 | | |
| 5 | Jawa Timur | 1 | Kediri | Gurah | 1 Krekep | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | Ngadiluwih | 2 Dukuh | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | Kayen Kidul | 3 Padangan | Rp 400,000,000 | | |
| | | 2 | Pacitan | Pringkuku | 1 Tamansari (Wisata Bukit Tompe) | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | 3 | Ponorogo | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | Jambon | 2 Jambon | | | Rp 400,000,000 | | |
| | | Sooko | 3 Jurug | | | Rp 300,000,000 | | |
| | | 4 | Trenggalek | Dongko | | 1 Petung | Rp 400,000,000 | |
| | | | | | | 2 | Rp 350,000,000 | |
| | | 6 | Kalimantan Timur | 1 | Kutai Kertanegara | Tenggarong Seberang | 1 Manunggal Jaya | Rp 400,000,000 |
| 2 | Kutai Timur | | | | | Bengalon | 1 Sekerat | Rp 400,000,000 |
| | | | | | | Muara Bengkal | 2 Muara Bengkal Ulu | Rp 400,000,000 |
| 7 | Kepulauan Riau | 1 | Natuna | Bunguran Timur | 1 Batu Gajah | Rp 400,000,000 | | |
| | | | | Serasan | 2 Tanjung Setulun | Rp 400,000,000 | | |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | 1 | Nagekeo | | 1 | Rp 350,000,000 | | |
| 9 | Sulawesi Barat | 1 | Polewali Mandar | | 1 | Rp 350,000,000 | | |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK Mendukung
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH I
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|------------------|---|------------------|----------------|------|------------------------|----------------|
| 10 | Sulawesi Selatan | 1 | Bone | Kajuara | 1 | Angkue | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Soppeng | Lalabata | 1 | Umpungeng | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Wajo | Majauleng | 1 | Macanang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tanasitolo | 2 | Tonra Lipue | Rp 400,000,000 |
| | | | | Keera | 3 | Ciromani | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sulawesi Utara | 1 | Minahasa | Sonder | 1 | Kauneran | Rp 400,000,000 |
| 12 | Sumatera Barat | 1 | Kota Pariaman | Pariaman Utara | 1 | Kampung Baru Padusunan | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Padang Pariaman | Sungai Limau | 1 | Guguak Kuranji Hilir | Rp 400,000,000 |
| 13 | Sumatera Selatan | 1 | Empat Lawang | Lintang Kanan | 1 | Muara Danau | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Musi Rawas Utara | Rupit | 1 | Sungai Jernih | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesasaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

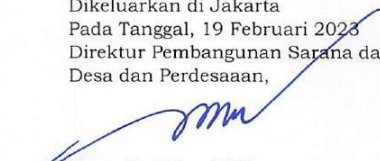
Total :
Provinsi 13
Kabupaten 21
Desa 32

Lampiran 4
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH II

| No | Nama | Jabatan |
|-----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Ir. Iwan Yuliadi Budi Irawan, MM | Ketua |
| 2. | Titik Alfah | Wakil Ketua I |
| 3. | Arief Mulyawan | Wakil Ketua II |
| 4. | Nur Sugianti | Anggota |
| 5. | Apriska Sagita M | Anggota |
| 6. | Indah Sefriyanti | Anggota |
| 7. | Fathimatizzahro | Anggota |
| 8. | Khairil Marpaung | Anggota |
| 9. | Bram Dimas Adhi Prasetya | Anggota |
| 10. | Sibbil Rusdianan Adriyani | Anggota |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesasaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

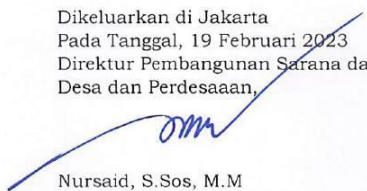
- 7 -

Lampiran 5
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

TENAGA PENUNJANG TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH II

1. Muhammad Setianto
2. Slamet Raharjo
3. Saiyidah Zaenab
4. Fiska Ambarwati
5. Muhammad Rizky Basuki
6. Abdus Salam
7. Rahmad Hidayat

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Lampiran 6
 Nomor : 3/PDP.01/2023
 Tanggal : 19 Februari 2023

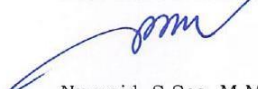
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
 Mendukung Destinasi Pariwisata Kelompok Kerja (POKJA) Wilayah II
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Jambi | 1 | Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | 1 Muaro Pijoan | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Cianjur | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Magelang | Dukun | 1 Banyubiru | Rp 400,000,000 |
| | | | | 2 | Semarang | Pringapus |
| | | Pringapus | 2 Candirejo | | | Rp 400,000,000 |
| | | Pabelan | 3 Pabelan | | | Rp 400,000,000 |
| | | Banyubiru | 4 Kemambang | | | Rp 400,000,000 |
| | | Bawen | 5 Poncoruso | Rp 400,000,000 | | |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Jember | | 1 | Rp 350,000,000 |
| | | | | 2 | Madiun | Geger |
| | | Sawahan | 2 Sidomulyo | | | Rp 400,000,000 |
| | | Sawahan | 3 Rejosari | | | Rp 400,000,000 |
| | | Balerejo | 4 Simo | | | Rp 400,000,000 |
| | | Madiun | 5 Dimong | | | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Sidoarjo | | 1 | Rp 400,000,000 |
| 5 | Kalimantan Barat | 1 | Kubu Raya | Sungai Kakap | 1 Jeruju Besar | Rp 400,000,000 |
| | | | | Sungai Kakap | 2 Sungai Kupah | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sambas | Jawai Selatan | 3 Jawai Laut | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH II
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|---------------------|---|-------------------|----------------------|------|---|----------------|
| 6 | Lampung | 1 | Lampung Timur | | 1 | Rp 400,000,000 | |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 1 | Lombok Tengah | Batukliang Utara | 1 | Mas Mas | Rp 400,000,000 |
| | | | | Batukliang Utara | 2 | Aik Bukak | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Rokan Hilir | Tanjung Medan | 1 | Tanjung Medan | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Rokan Hulu | Rambah Samo | 2 | Rambah Utama | Rp 400,000,000 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 1 | Gowa | Barombong | 1 | Bringala | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Pangkep | Tondong Tallasa | 2 | Bantimurung | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Takalar | Polongbangkeng Utara | 3 | Kale Ko'mara (Kawasan Wisata Timurung) | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | 1 | Jorong Lurah Bukit Nagari Balai Panjang | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Selatan | 1 | Ogan Komering Ulu | Kota Kayuagung | 2 | Teloko | Rp 400,000,000 |
| 12 | Sumatera Utara | 1 | Karo | Munthe | 1 | Gunung Saribu | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

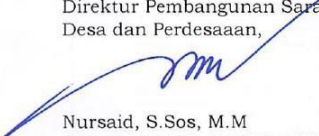
Total :
Provinsi 12
Kabupaten 19
Desa 30

Lampiran 7
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH III

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Dra. Sari Arta Uli Aritonang, MM | Ketua |
| 2. | Muhammad Mufti Almanak | Wakil Ketua I |
| 3. | Al Fatah Yasin | Wakil Ketua II |
| 4. | Ayu Sri Lestari | Anggota |
| 5. | M. Kabul Rizki | Anggota |
| 6. | Fauzy Ade Priyatna | Anggota |
| 7. | Fransiska Puspa Putri A | Anggota |
| 8. | Renny Julianti | Anggota |
| 9. | Zumrotus Sholihah | Anggota |

Dikeluarkan di Jakarta
Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Lampiran 8
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

TENAGA PENUNJANG TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH III

1. Aulya Puspitasari
2. Muh. Nur
3. Arief Muttaqien
4. Bambang Pr
5. Ahmad Said
6. Anita Surahmawati
7. Cita Ramasari

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023,
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

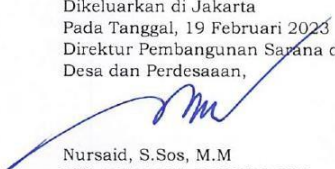
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH III
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI |
|----|---------------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Jambi | 1 | Sarolangun | Batang Asai | 1 Lubuk Bangkar | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Bandung Barat | Sindangkerta | 1 Pasirpogor | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Ciamis | Sindangkasih | 2 Gunungcupu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rajadesa | 3 Rajadesa | Rp 300,000,000 |
| | | 3 | Sumedang | Jatigede | 1 Kadujaya | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Brebes | Bandungsari | 1 Banjarharjo (Wisata Pancuran Mas) | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Kendal | Limbangan | 1 Gondang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Pegandon | 2 Wonosari | Rp 400,000,000 |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Banyuwangi | Genteng | 1 Genteng Kulon | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tegalsari | 2 Karangdoro | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kabat | 3 Tambong | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Mojokerto | Gondang | 1 Kebuntunggul | Rp 400,000,000 |
| 5 | Lampung | 1 | Lampung Utara | Sungkai Utara | 1 | Rp 400,000,000 |
| 6 | Nusa Tenggara Barat | 1 | Lombok Timur | Lenek | 1 Lenek Ramban Biak | Rp 400,000,000 |
| | | | | Aikmel | 2 Toya | Rp 400,000,000 |
| 7 | Riau | 1 | Siak | Dayun | 1 Kp. Dayung | Rp 400,000,000 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 1 | Luwu Timur | Nuha | 1 Sorowako | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nuha | 2 Matano | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wasuponda | 3 Ledu-Ledu | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tana Toraja | Mengkendek | 1 Palipu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rembon | 2 Lemo Menduruk | Rp 400,000,000 |
| | | | | Mengkendek | 3 Pa'tengko | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Toraja Utara | Sa'dan | 1 Sa'dan Ulusalu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Baruppu | 2 Benteng Batu | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK Mendukung
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH III
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|-----------------|---|----------------|---------------|---|--------------|----------------|
| 9 | Sulawesi Tengah | 1 | Donggala | Balaesang | 1 | Lombonga | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Morowali | Bungku Tengah | 1 | Matansala | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Pasaman Barat | Koto Balingka | 1 | Sikabau | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Utara | 1 | Samosir | Panguruan | 1 | Pardomuan I | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tapanuli Utara | Tarutung | 1 | Aeksiansimun | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tarutung | 2 | Hutatoruan I | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 11
Kabupaten 18
Desa 30

Lampiran 10
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH IV

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Rini Nuraini, S.H, M.Si | Ketua |
| 2. | Poltak | Wakil Ketua I |
| 3. | Zambrudin Ikram | Wakil Ketua II |
| 4. | Kristyarin Dwi Anggita | Anggota |
| 5. | Cahyo Wahyu Nugroho | Anggota |
| 6. | Rizky Apriyan | Anggota |
| 7. | Ikhfadhulhikmy Kurbia Bt | Anggota |
| 8. | Ajar Widhianto | Anggota |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Lampiran 11
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

TENAGA PENUNJANG TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH IV

1. Siti Chadijah
2. Kadarwinsyah
3. Nurul Hidayati
4. Risalatul Maunah
5. Dicky Kurniawan
6. Khoirul Aziz
7. Nur Rachmawaty

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

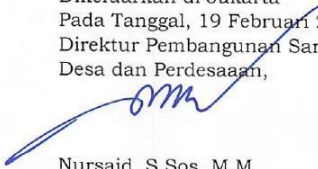
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
 DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH IV
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|--------------|---|----------------------|---------------------|---|--|----------------|
| 1 | Aceh | 1 | Aceh Besar | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| 2 | Banten | 1 | Serang | Ciomas | 1 | Sukadana | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jambi | 1 | Tebo | Tebo Ulu | 1 | Teluk Kasai | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rimbo Ulu | 2 | Suka Damai | Rp 400,000,000 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | Indramayu | Sindang | 1 | Sindang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Patrol | 2 | Patrol Lor | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Tasikmalaya | Salawu | 1 | Neglasari | Rp 400,000,000 |
| | | | | Rajapolah | 2 | Sukaraja | Rp 400,000,000 |
| 5 | Jawa Tengah | 1 | Pati | Tayu | 1 | Sambiroto | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sragen | Sambungmaca n | 1 | Bedoro | Rp 400,000,000 |
| | | | | Jenar | 2 | Banyuruip | Rp 400,000,000 |
| 6 | Jawa Timur | 1 | Blitar | Sanankulon | 1 | Sumber | Rp 400,000,000 |
| | | | | Sanankulon | 2 | Bendowulung | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Jombang | Ngoro | 1 | Kesamben | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kabuh | 2 | Tanjungwadung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wonosalam | 3 | Carangwulung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Wonosalam | 4 | Wonomerto | Rp 400,000,000 |
| 7 | Maluku Utara | 1 | Halmahera Selatan | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Indragiri Hilir | Mandah | 1 | Pulau Cawan | Rp 300,000,000 |
| | | | | Indragiri Hulu | 1 | Danau Pulau Indah (Wisata Kolam Renang Tuah Berlayar) | Rp 400,000,000 |
| | | 3 | Kampar | Koto Kampar Hulu | 1 | Sungai Kopu (Wisata Sungai Kopu) | Rp 400,000,000 |
| | | | | Siak Hulu | 2 | Buluh Cino (Wisata Danau Rengas) | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK MENDUKUNG
DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH IV
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|---|-------------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| 9 | Selawesi Selatan | 1 | Luwu Utara | Seko | 1 | Lodang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Malangke | 2 | Waelawi | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Pinrang | Patampanua | 1 | Malimpung | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Barat | 1 | Solok | Pantai Cermin | 1 | Nagari Surian | Rp 400,000,000 |
| | | | | Lembah Gumanti | 2 | Nagari Sungai Nanam | Rp 400,000,000 |
| 11 | Sumatera Selatan | 1 | Ogan Komering Ulu | Ulu Logan | 1 | Gunung Tiga | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

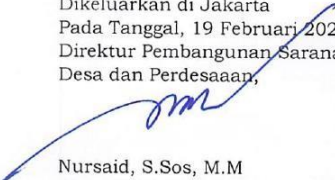
Total :
Provinsi 11
Kabupaten 16
Desa 30

Lampiran 12
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH IV

| | | |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1. | Sappe MP Sirait, S.STP, M.A.P | Ketua |
| 2. | Midian Petra Halomoan | Wakil Ketua I |
| 3. | Joko Priyanto | Wakil Ketua II |
| 4. | Sri Wahyuni | Anggota |
| 5. | Betharia Pardosi | Anggota |
| 6. | Raihan Syawali | Anggota |
| 7. | Ananda Ghifari Firdausyah | Anggota |
| 8. | Egit Putra | Anggota |
| 9. | Arta Oktoryna Sihite | Anggota |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007


- 19 -

Lampiran 13
Nomor : 51/PDP.01/2023
Tanggal : 19 Februari 2023

TENAGA PENUNJANG TIM IDENTIFIKASI KELOMPOK KERJA WILAYAH IV

1. Raksa Gumelar Noor Alamsyah
2. Helmi Agusriadi
3. Sustina Ardiningsih
4. Rizky Chondro Juherwanto
5. Wahid Ilham
6. La Ode Jumadil
7. Imron Rosadi

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,



Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Lampiran 14
 Nomor : 3/PDP.01/2023
 Tanggal : 19 Februari 2023

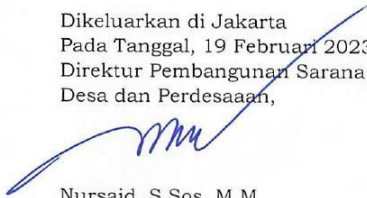
**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
 Mendukung Destinasi Pariwisata Kelompok Kerja (POKJA) Wilayah V
 TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI |
|----|------------------|---|-------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Aceh | 1 | Bireuen | Kota Juang | 1 Bireuen Meunasah TGK di Gadong | Rp 400,000,000 |
| | | | | Peudada | 2 Blang Kubu | Rp 400,000,000 |
| | | | | Matang Kuli | 3 Mesjid Pirak | Rp 400,000,000 |
| 2 | Jawa Barat | 1 | Bandung | Banjaran | 1 Pasirmulya | Rp 400,000,000 |
| | | | | Banjaran | 2 Margahurip | Rp 400,000,000 |
| | | | | Arjasari | 3 Pinggirsari | Rp 400,000,000 |
| | | | | Cimaung | 4 Cimaung | Rp 400,000,000 |
| | | | | Kutawaringin | 5 Sukamulya | Rp 400,000,000 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | Purbalingga | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Purworejo | Kaligesing | 1 Pandanrejo | Rp 400,000,000 |
| 4 | Jawa Timur | 1 | Ngawi | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | | | Bringin | 2 Dampit | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sampang | Sokobanah | 1 Bira Tengah | Rp 300,000,000 |
| | | 3 | Pamekasan | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | 4 | Bangkalan | | 1 | Rp 400,000,000 |
| | | | | | 2 | Rp 400,000,000 |
| 5 | Kalimantan Barat | 1 | Sekadau | Sekadau Hulu | 1 Tapang Perodah | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nanga Taman | 2 Pantok | Rp 400,000,000 |
| | | | | Nanga Mahap | 3 Tamang | Rp 400,000,000 |
| 6 | Kalimantan Timur | 1 | Berau | Biduk-Biduk | 1 Teluk Sumbang | Rp 400,000,000 |

**LOKUS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DESA WISATA YANG DIBANGUN UNTUK
MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA KELOMPOK KERJA (POKJA) WILAYAH IV
TAHUN 2023**

| NO | PROVINSI | | KABUPATEN | KEC | DESA | ALOKASI | |
|----|-------------------|---|------------------|------------------|------|--|----------------|
| 7 | Papua Barat | 1 | Pegunungan Arfak | | 1 | | Rp 400,000,000 |
| | | 2 | Sorong Selatan | Teminabuan | 1 | Aibobor | Rp 400,000,000 |
| 8 | Riau | 1 | Bengkalis | Bandar Laksamana | 1 | Sepahat (Wisata Pantai Sepahat Pesona) | Rp 400,000,000 |
| 9 | Sulawesi Tenggara | 1 | Muna | Lasalepa | 1 | Labone | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tongkundo | 2 | Oempu | Rp 400,000,000 |
| 10 | Sumatera Selatan | 1 | Banyuasin | Banyuasin II | 1 | Sungsang IV | Rp 400,000,000 |
| | | | | Tungkal Ilir | 2 | Teluk Tenggulang | Rp 400,000,000 |
| | | | | Airsalek | 3 | Damarwulan | Rp 400,000,000 |
| | | 1 | Musi Banyuasin | Sanga Desa | 1 | Kemang | Rp 400,000,000 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 19 Februari 2023
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaaan,


Nursaid, S.Sos, M.M
NIP. 19711127 199803 1 007

Total :
Provinsi 10
Kabupaten 16
Desa 30

Lampiran 9. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 107.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Desa, maka perlu disusun tentang petunjuk teknis bantuan pengembangan objek wisata tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151).

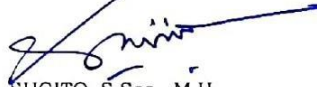
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 Tanggal 13 Februari 2023 (revisi kedua).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **27 Februari 2023**
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Lampiran 10. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 214.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
TERPADU DI KAWASAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Desa, maka perlu disusun petunjuk teknis bantuan pengembangan potensi pariwisata terpadu di kawasan perdesaan tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri ...

- Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);

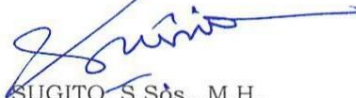
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA TERPADU DI KAWASAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata terpadu di kawasan Perdesaan tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 13 Februari 2023 (revisi kedua).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Lampiran 11. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 215.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN AMENITAS WISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Desa, maka perlu disusun petunjuk teknis bantuan pengembangan amenitas wisata tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi ...

- Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);

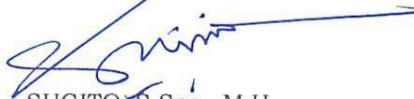
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGEMBANGAN AMENITAS WISATA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pengembangan amenitas wisata tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 13 Februari 2023 (revisi kedua).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Lampiran 12. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 126.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN
REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan kawasan yang produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa maka perlu disusun petunjuk teknis tentang bantuan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi pasar desa pada tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi...

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151); dan
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bada Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

MEMUTUSKAN:

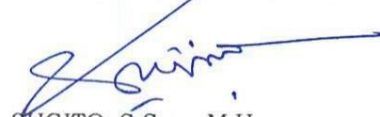
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi pasar desa dalam tahun anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-

067...

067.03.1.350456/2023 Tanggal 13 Februari 2023 (revisi kedua).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Lampiran 13. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 414.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL BANTUAN PEMBANGUNAN,
PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JALAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI MEKANISME SWAKELOLA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah aksesibilitas dan peningkatan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan, maka perlu adanya petunjuk teknis operasional yang mengatur program pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jalan kawasan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL BANTUAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JALAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI MEKANISME SWAKELOLA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Operasional ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mempermudah aksesibilitas dan peningkatan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah IV;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan.

Lampiran 14. Dokumen SK Dirjen PDP tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 521.1.3 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA NUSANTARA BERKELANJUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian Desa melalui pengembangan Desa wisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang...

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781); dan
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA NUSANTARA BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan Desa wisata nusantara secara berkelanjutan.
- KETIGA : Panduan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
a. kriteria dan indikator Desa wisata nusantara berkelanjutan;
b. peran *stakeholder* terkait Desa wisata nusantara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 197206021993021001

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN
PERDESAAN NOMOR 521.1.3 TAHUN 2023
TENTANG PANDUAN
PENGEMBANGAN LOMBA DESA
WISATA NUSANTARA TAHUN 2023

PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA NUSANTARA BERKELANJUTAN

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud
 - C. Tujuan
 - D. Daftar Istilah
- BAB II KONSEP DASAR DESA WISATA NUSANTARA BERKELANJUTAN
- A. Pembangunan Desa
 - B. Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
 - C. Tujuan Dan Manfaat Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
- BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA NUSANTARA BERKELANJUTAN
- A. Kriteria Dan Indikator Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
 - B. Rekomendasi Pendanaan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
 - C. Peran *Stakeholder* Terkait Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
 - D. Strategi Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
 - E. Kelembagaan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan
- BAB IV PENUTUP

Lampiran 15. Dokumentasi Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan



KATA PENGANTAR

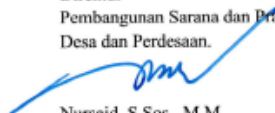
Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja juga disusun untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam pencapaian kinerja di tahun ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami perlukan, dan akan dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dikemudian hari.

Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan untuk kemajuan Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan maupun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Jakarta, Desember 2023
Direktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa dan Perdesaan.



Nursaid, S.Sos., M.M.

Lampiran 16. Dokumentasi Kegiatan

a. Pengembangan Obyek Wisata



**BANTUAN BALAI KESENIAN DESA TELUK SUMBANG, KAB. BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**BANTUAN BALAI KESENIAN DESA WRINGINANOM, KAB. PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**



**BANTUAN GAZEBO DESA PINGGIRSARI, KAB. BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**



**BANTUAN GAZEBO DESA SINDANG, KAB. INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**



**BANTUAN GAZEBO DESA BALAI PANJANG, KAB. LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**





**BANTUAN HOMESTAY DESA PONCORUSO, KAB. SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



**BANTUAN HOMESTAY DESA KEBONTUNGUL, KAB. MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**



BANTUAN HOMESTAY DESA PARA, KAB. KEPULAUAN SANGIHE



PROVINSI SULAWESI UTARA



**BANTUAN KOLAM PEMANDIAN DESA SIDOREJO, KAB. NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**



**BANTUAN KIOS/KEDAI DESA KEMAMBANG, KAB. SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



**BANTUAN TOILET DESA PANTOK, KAB. SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

b. Pasar Desa



**BANTUAN PASAR DESA TARAJU, KAB. TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**



**BANTUAN PASAR DESA BATULAYA, KAB. POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**BANTUAN PASAR DESA WALO, KAB. HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

